



PEMERINTAH DAERAH  
KABUPATEN KAPUAS HULU



# Perubahan RENCANA KERJA Tahun 2025



[https://bit.ly/Renja-2025\\_SETDAKH](https://bit.ly/Renja-2025_SETDAKH)

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU



## **KATA PENGANTAR**

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena telah melimpahkan berkat dan rahmat-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2025 ini.

Perubahan Rencana Kerja (Renja) adalah proses perubahan perencanaan program dan kegiatan untuk dilaksanakan pada Perubahan anggaran tahun 2025 dengan mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) periode 2025-2029 serta hasil evaluasi dari evaluator. Sedangkan Renja sebelum perubahan masih mengacu pada Rentsra Lama periode 2021-2025.

Setiap OPD dilingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu wajib menyusun Rencana Kerja (Renja) untuk dijadikan pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan yang akan dituangkan di dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Perjanjian Kinerja (PK) dan selanjutnya dilakukan pengukuran atas pencapaian kinerja. Hal ini dimaksudkan agar OPD yang bersangkutan dapat melaksanakan Program dan Kegiatan sehingga sasaran lima tahun kedepan dapat tercapai sesuai dengan apa yang telah direncanakan.

Dengan adanya Perubahan Rencana Kerja (Renja) ini setiap OPD dapat diukur keberhasilan atau kinerjanya dalam melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan target kinerja dan anggaran yang telah direncanakan. Hal ini juga menjadi tolak ukur keberhasilan OPD dalam melaksanakan kinerjanya sesuai tugas dan fungsi yang telah ditetapkan.

Dalam Perubahan Rencana Kerja (Renja) ini akan disajikan evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) sebelumnya, analisis kinerja, review terhadap Renja Murni (Sebelum Perubahan), usulan dari masyarakat dan Program dan Kegiatan Sekretariat Daerah yang akan dicapai pada tahun bersangkutan dan target perkiraan maju pada tahun berikutnya. Kami berharap dengan adanya Rencana Kerja (Renja) ini Program dan Kegiatan pada Sekretariat Daerah dapat terlaksana sesuai dengan perencanaan.




Kami menyadari dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) ini masih banyak kekurangan, untuk itu kami mohon masukan dan saran serta perbaikan dari atasan dan lembaga pengawasan untuk penyempurnaan Rencana Kerja (Renja) ini. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2025 ini.

Putussibau, Oktober 2025

Pj. Sekretaris Daerah  
Kabupaten Kapuas Hulu,



  
Agustinus Stormandi



## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	iii
DAFTAR TABEL.....	iv
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Landasan Hukum.....	2
1.3 Maksud dan Tujuan .....	4
1.4 Sistematika Penulisan .....	5
BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SEKRETARIAT	
DAERAH TAHUN LALU .....	7
2.1 Evaluasi pelaksanaan Renja Sekretariat Daerah Tahun 2024 dan Capaian Renstra Tahun Lalu .....	7
2.1.1 Tidak Terdapat Data Realisasi Kinerja Pada Tahun 2022 dan 2023 .....	12
2.1.2 Renstra Lama 2021-2026 Sekretariat Daerah .....	15
2.1.3 Rendahnya capaian Kinerja Indikator Persentase Publikasi dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan.....	16
2.2 Analisa Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	18
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Perangkat Daerah.....	24
2.4 Review Terhadap Renja Murni RKPD.....	25
BAB III TUJUAN DAN SASARAN SEKRETARIAT DAERAH .....	41
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional.....	41
3.2 Tujuan dan Sasaran Sekretariat Daerah .....	41
3.3 Program dan Kegiatan.....	45
BAB IV PENUTUP.....	51
LAMPIRAN.....	53



## DAFTAR TABEL

Tabel 1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD .....	8
Tabel 2 Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD .....	18
Tabel 3 Review Terhadap Renja Murni .....	27
Tabel 4 Tujuan dan Sasaran Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu .....	44
Tabel 5 Program dan Kegiatan dan Target Capaian Kinerja Renja .....	45
Tabel 6 Daftar Dokumen SAKIP Sekretariat Daerah .....	53



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, setiap Perangkat Daerah harus memiliki Rencana Pembangunan Tahunan Perangkat Daerah atau biasa disebut dengan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja Perangkat Daerah). Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode satu tahun. Perubahan Renja Perangkat Daerah disusun dengan mengacu pada Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) dan berpedoman pada Rancangan Strategis Perangkat Daerah (Renstra Perangkat Daerah) serta memuat program, kegiatan, lokasi kegiatan, indikator kinerja program dan kegiatan, kelompok sasaran, dan pendanaan. Sebagai sebuah dokumen resmi Perangkat Daerah, Renja Perangkat Daerah mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Perangkat Daerah dengan RKPD, sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah daerah (RPJMD) dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah. Selain itu Renja Perangkat Daerah juga berfungsi untuk menerjemahkan perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Renstra Perangkat Daerah ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Rencana Kerja (Renja) yang disusun akan menjawab pertanyaan apa yang menjadi tujuan, sasaran peningkatan pelayanan, target capaian kinerja, serta bagaimana pengorganisasian program dan kegiatan pelayanan OPD sesuai dengan Tupoksinya. Penyusunan Perubahan Renja ini nantinya akan menjadi tolak ukur dalam pengukuran Kinerja Sekretariat



Daerah yang dimuat dalam Monitoring Kinerja dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Perubahan Rencana Kerja (Renja) yang disusun oleh OPD memiliki keterkaitan dengan dokumen-dokumen lainnya. Penyusunan Perubahan Renja 2025 ini mengacu kepada hasil pengukuran dan evaluasi kinerja Renja Murni 2025 sebelumnya sehingga yang menjadi masalah pada Renja Murni 2025 tidak terjadi kembali pada Perubahan Renja yang akan datang.

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah menjadi bahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD). RKPD yang disusun akan dijadikan Pedoman dalam penyusunan Rencana Anggaran Pembangunan dan Belanja Daerah Perubahan (RAPBDP) yang selanjutnya akan disusun menjadi Anggaran Pembangunan dan Belanja Daerah Perubahan (APBDP). APBDP inilah yang nantinya akan menjadi panduan dalam penyusunan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Sekretariat Daerah.

Selanjutnya setelah dokumen Anggaran telah ditetapkan akan dibuat Perjanjian Kinerja Perubahan yang selanjutnya akan diukur dan hasil capaian kinerja akan menjadi bahan evaluasi untuk kemudian dilakukan perbaikan terhadap permasalahan tersebut.

## **1.2 Landasan Hukum**

Adapun yang menjadi landasan hukum dalam pembuatan Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2025 yaitu sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;



5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 8 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2025-2029;
11. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 107 Tahun 2021 tanggal 31 Desember 2021, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu;
12. Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 22/SETDA/PERKEU/2025 tentang Pembentukan Tim Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu;
13. Keputusan Sekretarias Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor: 54/SETDA/PERKEU/2025 Tahun 2025 tentang Pembentukan Tim Penyusunan Rencana Strategis Sekretariat daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2025-2029;



### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Penyusunan Dokumen Perubahan Rencana Kerja (Renja) tahun 2025 pada dasarnya bertujuan untuk menyediakan dokumen sekaligus rujukan utama sebagai acuan resmi bagi Pemerintah Daerah dan Sekretariat Daerah dalam menyusun Rancangan Anggaran Pembangunan dan Belanja Daerah Perubahan (RAPBDP) Tahun 2025. Selain itu, pada Tahun 2025 ini merupakan tahun terakhir untuk periode Renstra yang lama serta merupakan awal dari Renstra yang baru sehingga renja murni 2025 masih mengacu kepada Renstra lama sedangkan Renja Perubahan ini sudah mengacu kepada Renstra terbaru yaitu Renstra Periode 2025-2029.

Disamping itu, penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu juga dimaksudkan untuk mendukung terwujudnya cita-cita pembangunan daerah, terutama demi terlaksananya pembangunan secara menyeluruh dan merata bagi masyarakat Kabupaten Kapuas Hulu, melalui perencanaan yang sistematis, terarah, terpadu, bertahap, efektif, aspiratif, partisipatif serta berkesinambungan seiring terwujudnya kerangka pembangunan daerah yang kokoh, tangguh dan mandiri sebagaimana yang diamanatkan dalam visi dan misi Kabupaten Kapuas Hulu.

Sejalan dengan fungsi dan cakupan pokok dokumen Rencana Kerja (Renja) yang pada hakekatnya merupakan komitmen Sekretariat Daerah serta memuat seluruh kebijakan dan arah kebijakan pembangunan dalam masa satu tahunan, maka secara garis besar, Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2025 disusun dengan maksud dan tujuan sebagai berikut :

1. Menyesuaikan kembali Indikator beserta targetnya sesuai dengan RENSTRA yang terbaru periode tahun 2025-2029;
2. Untuk dapat digunakan sebagai instrumen dalam mengukur efisiensi dan efektifitas kinerja.



3. Terwujudnya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan serta evaluasi hasil pembangunan;
4. Sebagai acuan dalam menuangkan Program/Kegiatan ke dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS).
5. Menjabarkan Visi dan Misi Kepala Daerah kedalam Program dan Kegiatan Sekretariat Daerah.
6. Sebagai patokan dalam penyusunan Perjanjian Kinerja, Pengukuran kinerja serta Evaluasi Kinerja.

#### **1.4 Sistematika Penulisan**

Untuk dapat menggambarkan dan menguraikan secara sistematis arah kebijakan prioritas pembangunan dan wujud masa depan yang diinginkan dan diperjuangkan, maka materi Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2025 disusun dalam sistematika sebagai berikut :

##### **BAB I PENDAHULUAN**

Pada Bab ini akan dipaparkan tentang Latar Belakang; Landasan Hukum; Maksud Dan Tujuan; dan Sistematika Penulisan.

##### **BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SEKRETARIAT DAERAH TAHUN LALU**

Pada Bab ini akan dipaparkan Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD dan Capaian Renstra OPD; Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra OPD; Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD; Review terhadap Rancangan Awal RKPD.

##### **BAB III TUJUAN DAN SASARAN SEKRETARIAT DAERAH**

Pada Bab ini akan dipaparkan Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi; Tujuan dan sasaran Renja OPD.

##### **BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN SEKRETARIAT DAERAH**

Pada Bab ini akan dipaparkan Rencana Kerja dan Pendanaan dalam bentuk program dan kegiatan Sekretariat Daerah.

##### **BAB V PENUTUP**



Pada Bab ini akan dipaparkan kesimpulan dari pembuatan Renja Sekretariat Daerah.



## **BAB II**

### **HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SEKRETARIAT DAERAH TAHUN BERJALAN**

#### **2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Sekretariat Daerah Tahun 2025 dan Capaian Renstra Sekretariat Daerah**

Evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 dan capaian Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 merupakan kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (Tahun berjalan). Evaluasi tersebut dilakukan melalui pengukuran kinerja yang dilakukan berdasarkan target kinerja pada Perjanjian Kinerja terhadap realisasi kinerja pada Lkjp Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021-2026 yang mencakup program dan kegiatan, indikator kinerja dan Target Akhir Renstra serta capaian tahun 2024.

Evaluasi hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (tahun N) digunakan untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja dan kendala yang dihadapi serta solusi untuk mengatasi kendala tersebut. Selain itu, evaluasi hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 dilakukan untuk memastikan bahwa indikator kinerja program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 dapat dicapai dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 serta sasaran dan prioritas pembangunan Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2025, seperti pada tabel berikut ini:



Tabel 1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD

Kode	Program/ Kegiatan	Indikator	Target Akhir Renstra (2029)	Realisasi 2022	Target dan Realisasi 2023 (N-2)			2024 (n-1)		Realisasi 2024 (n-1)		Catatan
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)	Target	Satuan	Realisasi Capaian	Tingkat Capaian %	
Sasaran 1	Meningkatnya Kualitas Kebijakan dibidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase kebijakan strategis dibidang Pemerintahan yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundangan	100,00	-	-	-	#VALU E!	-	-	-	-	IKU
Sasaran 1.ind2		Persentase kebijakan strategis dibidang Kesejahteraan Rakyat yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundangan	95,00	-	-	-	#VALU E!	-	-	-	-	IKU
Sasaran 2	Meningkatnya Kualitas Kebijakan diBidang Perekonomian dan SDA	Persentase kebijakan strategis dibidang Perekonomian dan SDA yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundangan	100,00	-	-	-	#VALU E!	-	-	-	-	IKU
Sasaran 3	Meningkatnya Akuntabilitas kinerja Sekretariat Daerah	Nilai SAKIP Sekretariat Daerah	80,00	D	BB	CC	84,43	70	Nilai	60,4	86,29	IKU
Sasaran 4	Meningkatnya Kualitas Kebijakan dibidang Administrasi Umum	Persentase kebijakan strategis dibidang Administrasi Umum yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundangan	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	IKU
Sasaran 5	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik pada Sekretariat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Sekretariat Daerah	88,00	-	80,73	83,84	103,85	80,8	Nilai	87,78	108,64	IKU



Kode	Program/ Kegiatan	Indikator	Target Akhir Renstra (2029)	Realisasi 2022	Target dan Realisasi 2023 (N-2)			2024 (n-1)		Realisasi 2024 (n-1)		Catatan
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)	Tar get	Satuan	Realisasi Capaian	Tingkat Capaian %	
<b>4.01.0 1</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>Jumlah Kebijakan Strategis di Bidang Administrasi Umum yang ditetapkan sesuai Peraturan Perundangan</b>	<b>151</b>	<b>-</b>	<b>100%</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
4.01.0 1.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan dokumen Perencanaan, dokumen Penganggaran dan Laporan Kinerja yang sesuai dengan pedoman teknis	100,00	-	100%	-	#VALUE! !	100	%	91,89	91,89	
4.01.0 1.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan sesuai Pedoman yang Berlaku	100,00	-	100%	-	#VALUE! !	100	%	100	100,00	
4.01.0 1.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang dikelola dengan baik	95,00	-	95 %	-	#VALUE! !	95	%	100	105,26	
4.01.0 1.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian yang sesuai dengan pedoman berlaku	90,00	-	87 %	-	#VALUE! !	-	-	-	-	Indikator Baru
4.01.0 1.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Administrasi Umum yang terpenuhi	100,00	-	100 %	-	#VALUE! !	100	%	100	100,00	
4.01.0 1.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pelaksanaan Pengadaan Barang Milik Daerah yang Terakomodir	100,00	-	100 %	-	#VALUE! !	100	%	100	100,00	
4.01.0 1.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang tersedia	100,00	-	100 %	-	#VALUE! !	100	%	100	100,00	



<https://bit.ly/Renja-2025-SETDAKH>  
 Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2025  
 Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu

Kode	Program/ Kegiatan	Indikator	Target Akhir Renstra (2029)	Realisasi 2022	Target dan Realisasi 2023 (N-2)			2024 (n-1)		Realisasi 2024 (n-1)		Catatan
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)	Tar get	Satuan	Realisasi Capaian	Tingkat Capaian %	
4.01.0 1.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara Daerah	100,00	-	100 %	-	#VALUE !	100	%	100	100,00	
4.01.0 1.2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase Pelayanan Keuangan dan Operasional Kepala Daerah	100,00	-	100 %	-	#VALUE !	100	%	100	100,00	
4.01.0 1.2.13	Penataan Organisasi	Jumlah Kelembagaan Kabupaten yang Tepat Fungsi dan Tepat Ukuran	3,00	-	-	-	#VALUE !	-	-	-	-	Indikator Baru
4.01.0 1.2.13. ind2		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Analisis Jabatan	1,00	-	-	-	#VALUE !	5	Anjab	5	100,00	
4.01.0 1.2.13. ind3		Jumlah Perangkat Daerah yang telah menetapkan Standar Pelayanan Publik	46,00	-	-	-	#VALUE !	7	PD	7	100,00	
4.01.0 1.2.13. ind4		Jumlah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Reformasi Birokrasi	8,00	-	-	-	#VALUE !	6	PD	6	100,00	
4.01.0 1.2.13. ind5		Jumlah Perangkat Daerah dengan Predikat AKIP Minimal B sesuai Hasil Evaluasi Tim APIP dari Perangkat Daerah yang dievaluasi	26,00	-	-	-	#VALUE !	18	PD	20	111,11	
4.01.0 1.2.14	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Persentase Layanan Keprotokolan Pimpinan	86,00	-	175	-	#VALUE !	100	%	98	98,00	
4.01.0 1.2.14. ind2		Persentase Layanan Komunikasi Pimpinan	85,00	-	210	-	#VALUE !	100	%	98,26	98,26	



<https://bit.ly/Renja-2025-SETDAKH>  
 Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2025  
 Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu

Kode	Program/ Kegiatan	Indikator	Target Akhir Renstra (2029)	Realisasi 2022	Target dan Realisasi 2023 (N-2)			2024 (n-1)		Realisasi 2024 (n-1)		Catatan
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)	Tar get	Satuan	Realisasi Capaian	Tingkat Capaian %	
4.01.0 1.2.14. ind3		Persentase Pendokumentasian Tugas Pimpinan	90,00	-	200	-	#VALUE !	100	%	98	98,00	
<b>4.01.0 2</b>	<b>PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT</b>	<b>Jumlah Kebijakan Strategis di Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang ditetapkan sesuai Peraturan Perundangan</b>	<b>95,00</b>	<b>-</b>	<b>100%</b>	<b>-</b>	<b>#VALU E!</b>	<b>522</b>	<b>Peraturan</b>	<b>541</b>	<b>103,64</b>	
4.01.0 2.2.01	Administrasi Tata Pemerintahan	Persentase peningkatan penyelesaian administrasi batas antar wilayah Kecamatan dan Kelurahan	72,00	-	56%	-	#VALUE !	62	%	53,59	86,44	
4.01.0 2.2.01. ind2		Persentase Peningkatan Pemutakhiran Data Rupabumi Kecamatan	90,00	-	50%	-	#VALUE !	74	%	86,96	117,51	
4.01.0 2.2.01. ind3		Persentase Jumlah Urusan pada OPD yang Menyusun LPPD sesuai petunjuk	100,00	-	85%	-	#VALUE !	90	%	100	111,11	
4.01.0 2.2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Jumlah rumusan kebijakan di bidang bina mental spiritual yang ditindaklanjuti menjadi kebijakan	55,00	-	100%	-	#VALUE !	17	SK	17	100,00	
4.01.0 2.2.02. ind2		Jumlah rumusan Kebijakan terkait Kesejahteraan Sosial yang terlaksana	5,00	-	100%	-	#VALUE !	4	Keg.	4	100,00	
4.01.0 2.2.02. ind3		Jumlah Rumusan Kebijakan Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang terlaksana	20,00	-	100%	-	#VALUE !	6	Keg.	6	100,00	
4.01.0 2.2.03	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Persentase penyelesaian Proses Penyusunan produk hukum	90,00	-	-	-	#VALUE !	90	%	82,13	91,25	



<https://bit.ly/Renja-2025-SETDAKH>  
 Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2025  
 Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu

Kode	Program/ Kegiatan	Indikator	Target Akhir Renstra (2029)	Realisasi 2022	Target dan Realisasi 2023 (N-2)			2024 (n-1)		Realisasi 2024 (n-1)		Catatan
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)	Tar get	Satuan	Realisasi Capaian	Tingkat Capaian %	
4.01.0 2.2.03. ind2		Persentase Fasilitas Bantuan Hukum	90,00	-	-	-	#VALUE !	90	%	86,67	96,30	
4.01.0 2.2.03. ind3		Persentase Publikasi dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan	100,00	-	-	-	#VALUE !	90	%	50	55,56	
4.01.0 2.2.04	Fasilitasi Kerjasama Daerah	Persentase Kerjasama Wajib Daerah	100,00	-	17%	-	#VALUE !	90	%	91,3	101,44	
<b>4.01.0 3</b>	<b>PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN</b>	<b>Jumlah Kebijakan Strategis di Bidang Perekonomian, Pembangunan, SDA dan PBJ yang ditetapkan sesuai Peraturan Perundangan</b>	<b>95,00</b>	<b>-</b>	<b>100%</b>	<b>-</b>	<b>#VALU E!</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>100,00</b>	
4.01.0 3.2.01	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Persentase kebijakan perekonomian yang di tindaklanjuti	100,00	-	100%	-	#VALUE !	100	%	100	100,00	
4.01.0 3.2.02	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Persentase kebijakan Administrasi Pembangunan yang di tindaklanjuti	100,00	-	100%	-	#VALUE !	100	%	100	100,00	
4.01.0 3.2.03	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase capaian layanan pengadaan barang dan jasa dengan metode pemilihan tender/seleksi dan e-purchasing	100,00	-	-	-	#VALUE !	80	%	100	125,00	



<https://bit.ly/Renja-2025-SETDAKH>  
Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2025  
Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu

Kode	Program/ Kegiatan	Indikator	Target Akhir Renstra (2029)	Realisasi 2022	Target dan Realisasi 2023 (N-2)			2024 (n-1)		Realisasi 2024 (n-1)		Catatan
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)	Tar get	Satuan	Realisasi Capaian	Tingkat Capaian %	
4.01.0 3.2.03. ind2		Jumlah Penerima Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Secara Elektronik	1050	-	-	-	#VALUE! !	50	OPD	50	100,00	
4.01.0 3.2.04	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Persentase rekomendasi Kebijakan Sumber Daya Alam yang di tindaklanjuti	100,00	-	-	-	#VALUE! !	100	%	100	100,00	

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap Renja Sekretariat Daerah Tahun 2025 pada tabel diatas dapat dijelaskan beberapa hal sebagai berikut :



#### 2.1.1.1. Tidak Terdapat Data Realisasi Kinerja Pada Tahun 2022 dan 2023

Pada Tahun 2022 sampai dengan 2023 tidak terdapat data realisasi kinerja seperti terlihat pada tabel diatas. Pada Tahun 2022 realisasi yang ada hanya pada satu indikator saja yaitu Predikat SAKIP Sekretariat Daerah mendapat Nilai D dengan target BB sehingga capaian hanya mencapai 31,9% saja.

Indikator Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Kabupaten merupakan indikator pada Renstra **lama** periode 2021-2026 dan pada periode Rentsra berikutnya indikator tersebut tidak digunakan lagi. Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2021 belum dievaluasi, sehingga Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2022 belum diketahui. Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Kabupaten Kapuas Hulu terakhir di reviu oleh Kementrian Dalam Negeri pada tahun 2018 dengan nilai 2,886. Reviu Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2018 masih digunakan sebagai nilai terakhir LPPD Kabupaten Kapuas Hulu karena LPPD tahun 2019 sampai dengan saat ini belum mendapatkan reviu. Berdasarkan permasalahan tersebut maka Indikator terkait LPPD tidak dapat digunakan lagi.

Pada Tahun 2022 dan 2023 Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu tidak melakukan pengukuran IKI atas kinerja yang telah diperjanjikan. Pengukuran kinerja didasarkan atas serapan anggaran sehingga tidak memiliki sumber data atau data dukung yang diharapkan oleh pihak evaluator. Pengukuran Kinerja seharusnya dilakukan dengan mengumpulkan data kinerja sebagaimana yang telah dijabarkan dalam IKI sehingga nilai yang ada pada dokumen pengukuran berdasarkan bukti dukung dan dapat dipertanggungjawabkan keabsahan datanya.

Secara umum permasalahan yang paling krusial terhadap permasalahan diatas adalah penyebab dan solusinya:



1. Rendahnya kemampuan SDM dalam menyusun SAKIP. SDM yang menyusun SAKIP belum berpengalaman serta belum pernah mengikuti Diklat dan Bimtek mengenai SAKIP. Saran mengenai permasalahan ini agar mempersiapkan anggaran untuk Diklat dan Bimtek.
2. Minimnya jumlah SDM yang menyusun Dokumen SAKIP. Pada Tahun 2021 SDM yang menangani Perencanaan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu hanya terdiri dari 2 (dua) orang. Minimnya SDM dalam perencanaan dengan kompleksitas pekerjaan sehingga pekerjaan menjadi tidak efektif dan efisien dan menyebabkan nilai SAKIP rendah. Saran mengenai permasalahan ini yaitu pada tahun 2023 menambah SDM 1 (satu) orang dan pada tahun 2024 menambah 2 (dua) orang Perencana sehingga pekerjaan menjadi lebih efektif dan efisien.
3. Tingginya mobilitas dan tanggung jawab yang luas cakupannya pada Sekretariat Daerah. Sekretariat Daerah memiliki 3 Asisten dan 9 Bagian yang berarti begitu besar dan kompleksnya tugas dan pekerjaan pada Sekretariat Daerah. Dapat dikatakan bahwa dalam 1 bagian hampir setara dengan 1 OPD dan beberapa Bagian merupakan pembina pada setiap OPD.

#### 2.1.2 Renstra **Lama** 2021-2026 Sekretariat Daerah

Sekretariat Daerah telah memiliki [Renstra](#) periode 2021-2026 (**Renstra Lama**) yang telah ditetapkan pada Bulan Januari 2023 dan telah mengalami revisi sebanyak 1 kali. Sepanjang tahun 2023 Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu tidak pernah melakukan pengukuran kinerja sampai level individu, pengukuran hanya pada sampai level eselon II atau pimpinan level OPD. Namun pada pertengahan Tahun 2024 Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu sudah mulai melakukan Pengukuran Kinerja sampai kepada level Staf.

Dalam proses pengukuran kinerja, terdapat perubahan terhadap beberapa indikator, sasaran dan target kinerja yang mengharuskan melakukan Revisi terhadap Renstra tersebut.



Beberapa permasalahan yang terdapat pada dokumen Renstra lama tersebut adalah sebagai berikut:

1. Tidak sesuai IKU pada level dibawahnya. Sasaran setiap indikator merupakan penunjang untuk mewujudkan indikator pada level diatasnya. Sasaran level bawah merupakan sebuah rumusan untuk mewujudkan sasaran level diatasnya. Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu terdapat 3 Program yang merupakan tanggung jawab dari ke-3 Asisten yaitu Asisten Administrasi Umum, Asisten Pemerintahan dan Kesra dan Asisten Perekonomian Pembangunan.
2. Terdapat indikator yang tidak sesuai dengan tugas pokok dan fungsi atau sudah tidak relevan lagi dengan kondisi saat ini seperti pada Bagian Organisasi, Bagian Hukum dan Bagian Pengadaan Barang dan Jasa yang tidak tepat sasaran sehingga perlu melakukan perubahan indikator.
3. Terdapat target kinerja yang tidak tercapai dan melebihi target. Kesalahan paling banyak terdapat target yang sangat rendah sehingga pada saat pengukuran terjadi lonjakan capaian yang sangat luar biasa diatas 130%. Capaian yang ideal adalah antara 90% s/d 130%. Apabila capaian tidak pada interval tersebut dapat dikatakan bahwa perencanaan yang telah ditetapkan tidak sangat matang sehingga perlu dilakukan revisi kembali terhadap target. Salah satu indikator yang targetnya telah melebihi seperti: Kerjasama wajib daerah (Indikator Lama) capaian 317%, Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi capaian 380%, Pendampingan Kelembagan 400%, pendampingan ketatalaksanaan 1000%, dan pendampingan SAKIP 860%.

#### 2.1.3. Rendahnya capaian Kinerja Indikator Persentase Publikasi dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan

Indikator Persentase Publikasi dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan pada Tahun 2024 ditargetkan sebesar 90% dan hanya terealisasi sebanyak 50% saja dengan Tingkat capaian kinerja



hanya sebesar 55,56% saja. Hal ini disebabkan karena tidak kesesuaian antara target dan realisasi kinerja sementara yang dilakukan penyebarluasan hanya perda dan perbup saja sehingga ditargetkan kembali pada tahun 2025 menurunkan target menjadi 70% saja. Namun ketika melakukan penurunan target menjadi 70%, capaian kinerja sampai dengan Triwulan ke III tahun 2025 ini capaian terhadap indikator ini sudah mencapai 177,55% yang artinya pada triwulan ke IV nanti bisa jauh lebih besar lagi. Sehingga perlu Kembali menyesuaikan kembali target yang sesuai. Permasalahannya dikarenakan ada beberapa item yg ditambahkan dalam aplikasi JDIH seperti PP, Permendagri, UU dan Perdes. Sementara sebelumnya hanya perda dan perbup saja yang dilakukan publikasi pada JDIH.



## 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah merupakan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan. Sehubungan dengan hal tersebut, analisis kinerja Perangkat Daerah dilakukan terhadap penilaian capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah Tahun 2025 sesuai IKU baru yang telah ditetapkan pada Renstra **Baru** Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

Tabel 2 Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD

Kode	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target RENSTRA				Realisasi		Proyeksi		Catatan Analisis
				2021-25		2025-29		Tahun N-2	Tahun N-1	Tahun N	Tahun N+1	
				Tahun (N-2) 2022	Tahun (N-1) 2023	Tahun N (2024)	Tahun (N+1) 2025					
Sasaran 1	Persentase kebijakan strategis dibidang Pemerintahan yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundangan	Nihil	Nihil	-	-	95,00	96,00	-	104	100	100	
Sasaran 1.ind2	Persentase kebijakan strategis dibidang Kesejahteraan Rakyat yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundangan	Nihil	Nihil	-	-	95,00	95,00	-		100	100	
Sasaran 2	Persentase kebijakan strategis dibidang Perekonomian dan SDA yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundangan	Nihil	Nihil	-	-	100,00	100,00	-	100	100	100	
Sasaran 3	Nilai SAKIP Sekretariat Daerah	Nihil	Nihil	BB	BB	67,50	70,00	CC	60,4	B	B	
Sasaran 4	Persentase kebijakan strategis dibidang Administrasi Umum yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundangan	Nihil	Nihil	-	-	100,00	100,00	-	100	90	100	
Sasaran 5	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Sekretariat Daerah	84,00	Nihil	-	-	84,00	85,00	83,8	87,8	85,00	86,50	



<https://bit.ly/Renja-2025-SETDAKH>  
 Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2025  
 Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu

Kode	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target RENSTRA				Realisasi		Proyeksi		Catatan Analisis
				2021-25		2025-29		Tahun N-2	Tahun N-1	Tahun N	Tahun N+1	
				Tahun (N-2) 2022	Tahun (N-1) 2023	Tahun N (2024)	Tahun (N+1) 2025					
<b>4.01.01</b>	<b>Jumlah Kebijakan Strategis di Bidang Administrasi Umum yang ditetapkan sesuai Peraturan Perundangan</b>	<b>Nihil</b>	<b>41</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>41</b>	<b>30</b>	<b>-</b>	<b>12</b>	<b>41</b>	<b>100</b>	
4.01.01.2.01	Persentase Penyusunan dokumen Perencanaan, dokumen Penganggaran dan Laporan Kinerja yang sesuai dengan pedoman teknis	Nihil	Nihil	100	100	100,00	100,00	-	91,9	100,00	100,00	
4.01.01.2.02	Persentase Administrasi Keuangan sesuai Pedoman yang Berlaku	Nihil	Nihil	95	100	100,00	100,00	-	100	100,00	100,00	
4.01.01.2.03	Persentase Barang Milik Daerah yang dikelola dengan baik	Nihil	Nihil	95	95	95,00	95,00	-	100	95,00	95,00	
4.01.01.2.05	Persentase Administrasi Kepegawaian yang sesuai dengan pedoman berlaku	Nihil	Nihil	87	90	90,00	90,00	-	-	90,00	90,00	Indikator Baru
4.01.01.2.06	Persentase Pengelolaan Administrasi Umum yang terpenuhi	Nihil	Nihil	100	100	100,00	100,00	-	100	100,00	100,00	0
4.01.01.2.07	Persentase Pelaksanaan Pengadaan Barang Milik Daerah yang Terakomodir	Nihil	Nihil	100	100	100,00	100,00	-	100	100,00	100,00	0
4.01.01.2.08	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang tersedia	Nihil	Nihil	100	100	100,00	100,00	-	100	100,00	100,00	0
4.01.01.2.09	Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara	Nihil	Nihil	100	100	100,00	100,00	-	100	100,00	100,00	0



<https://bit.ly/Renja-2025-SETDAKH>  
 Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2025  
 Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu

Kode	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target RENSTRA				Realisasi		Proyeksi		Catatan Analisis
				2021-25		2025-29		Tahun N-2	Tahun N-1	Tahun N	Tahun N+1	
				Tahun (N-2) 2022	Tahun (N-1) 2023	Tahun N (2024)	Tahun (N+1) 2025					
4.01.01.2.11	Persentase Pelayanan Keuangan dan Operasional Kepala Daerah	Nihil	Nihil	100	100	100,00	100,00	-	100	100,00	100,00	0
4.01.01.2.13	Jumlah Kelembagaan Kabupaten yang Tepat Fungsi dan Tepat Ukuran	Nihil	Nihil	5	6	1,00	3,00	-	-	1,00	3,00	Indikator Baru
4.01.01.2.13.ind2	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Analisis Jabatan	Nihil	Nihil	0	0	1,00	1,00	-	5	1,00	1,00	0
4.01.01.2.13.ind3	Jumlah Perangkat Daerah yang telah menetapkan Standar Pelayanan Publik	Nihil	Nihil	0	0	6,00	10,00	-	7	6,00	10,00	0
4.01.01.2.13.ind4	Jumlah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Reformasi Birokrasi	Nihil	Nihil	0	0	6,00	8,00	-	6	6,00	8,00	0
4.01.01.2.13.ind5	Jumlah Perangkat Daerah dengan Predikat AKIP Minimal B sesuai Hasil Evaluasi Tim APIP dari Perangkat Daerah yang dievaluasi	Nihil	Nihil	0	0	22,00	23,00	-	20	22,00	23,00	0
4.01.01.2.14	Persentase Layanan Keprotokolan Pimpinan	Nihil	Nihil	175	200	81,00	82,00	-	98	81,00	82,00	0
4.01.01.2.14.ind2	Persentase Layanan Komunikasi Pimpinan	Nihil	Nihil	210	230	82,00	83,00	-	98,26	82,00	83,00	0



<https://bit.ly/Renja-2025-SETDAKH>  
 Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2025  
 Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu

Kode	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target RENSTRA				Realisasi		Proyeksi		Catatan Analisis
				2021-25		2025-29		Tahun N-2	Tahun N-1	Tahun N	Tahun N+1	
				Tahun (N-2) 2022	Tahun (N-1) 2023	Tahun N (2024)	Tahun (N+1) 2025					
4.01.01.2.14.ind3	Persentase Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Nihil	Nihil	200	200	86,00	87,00	-	98	86,00	87,00	0
<b>4.01.02</b>	<b>Jumlah Kebijakan Strategis di Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang ditetapkan sesuai Peraturan Perundangan</b>	<b>Nihil</b>	<b>19,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>19,00</b>	<b>19,00</b>	<b>-</b>	<b>541</b>	<b>19,00</b>	<b>19,00</b>	<b>0</b>
4.01.02.2.01	Persentase peningkatan penyelesaian administrasi batas antar wilayah Kecamatan dan Kelurahan	Nihil	Nihil	66	77	68,00	68,00	-	53,59	68,00	68,00	0
4.01.02.2.01.ind2	Persentase Peningkatan Pemutakhiran Data Rupabumi Kecamatan	Nihil	Nihil	50	74	78,00	78,00	-	86,96	78,00	78,00	0
4.01.02.2.01.ind3	Persentase Jumlah Urusan pada OPD yang Menyusun LPPD sesuai petunjuk	Nihil	Nihil	85	90	100,00	100,00	-	100	100,00	100,00	0
4.01.02.2.02	Jumlah rumusan kebijakan di bidang bina mental spiritual yang ditindaklanjuti menjadi kebijakan	Nihil	Nihil	0	0	11,00	11,00	-	17	11,00	11,00	0
4.01.02.2.02.ind2	Jumlah rumusan Kebijakan terkait Kesejahteraan Sosial yang terlaksana	Nihil	Nihil	0	0	1,00	1,00	-	4	1,00	1,00	0
4.01.02.2.02.ind3	Jumlah Rumusan Kebijakan Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang terlaksana	Nihil	Nihil	0	0	4,00	4,00	-	6	4,00	4,00	0
4.01.02.2.03	Persentase penyelesaian Proses Penyusunan produk hukum	Nihil	Nihil	0	0	82,00	83,00	-	82,1	82,00	83,00	0
4.01.02.2.03.ind2	Persentase Fasilitasi Bantuan Hukum	Nihil	Nihil	0	0	77,00	80,00	-	86,7	77,00	80,00	0



<https://bit.ly/Renja-2025-SETDAKH>  
 Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2025  
 Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu

Kode	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target RENSTRA				Realisasi		Proyeksi		Catatan Analisis
				2021-25		2025-29		Tahun N-2	Tahun N-1	Tahun N	Tahun N+1	
				Tahun (N-2) 2022	Tahun (N-1) 2023	Tahun N (2024)	Tahun (N+1) 2025					
4.01.02.2.03.ind3	Persentase Publikasi dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan	Nihil	Nihil	0	0	100,00	100,00	-	50	100,00	100,00	0
4.01.02.2.04	Persentase Kerjasama Wajib Daerah	Nihil	Nihil	17	21	100,00	100,00	-	91,3	100,00	100,00	0
<b>4.01.03</b>	<b>Jumlah Kebijakan Strategis di Bidang Perekonomian, Pembangunan, SDA dan PBJ yang ditetapkan sesuai Peraturan Perundangan</b>	<b>Nihil</b>	<b>19,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>19,00</b>	<b>19,00</b>	<b>-</b>	<b>100</b>	<b>19,00</b>	<b>19,00</b>	<b>0</b>
4.01.03.2.01	Persentase kebijakan perekonomian yang di tindaklanjuti	Nihil	Nihil	0	0	100,00	100,00	-	100	100,00	100,00	0
4.01.03.2.02	Persentase kebijakan Administrasi Pembangunan yang di tindaklanjuti	Nihil	Nihil	0	0	100,00	100,00	-	100	100,00	100,00	0



Kode	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target RENSTRA				Realisasi		Proyeksi		Catatan Analisis
				2021-25		2025-29		Tahun N-2	Tahun N-1	Tahun N	Tahun N+1	
				Tahun (N-2) 2022	Tahun (N-1) 2023	Tahun N (2024)	Tahun (N+1) 2025					
4.01.03.2.03	Persentase capaian layanan pengadaan barang dan jasa dengan metode pemilihan tender/seleksi dan e-purchasing	Nihil	Nihil	0	0	100,00	100,00	-	100	100,00	100,00	0
4.01.03.2.03.ind2	Jumlah Penerima Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Secara Elektronik	Nihil	Nihil	0	0	210,00	210,00	-	50	210,00	210,00	0
4.01.03.2.04	Persentase rekomendasi Kebijakan Sumber Daya Alam yang di tindaklanjuti	Nihil	Nihil	0	0	100,00	100,00	-	100	100,00	100,00	0

Berdasarkan tabel diatas ditandai dengan warna kuning telah dijelaskan dan diuraikan sebelumnya pada halaman **14**.



### **2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah**

Sekretariat Daerah merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang membantu tugas Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang pemerintahan umum dengan fungsi koordinasi, mengintegrasikan dan mensinkronisasikan seluruh penyelenggaraan tugas pimpinan dan wakil pimpinan.

Dalam melaksanakan tugasnya Sekretariat Daerah secara teknis membantu kelancaran tugas pimpinan dan wakil pimpinan secara administrasi bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dalam memberikan pelayanan kepada pimpinan dan wakil pimpinan, tugas Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu dituntut semakin cepat, tepat serta mampu meletakkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Beberapa isu strategis diprediksi akan berpengaruh signifikan terhadap kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu. Isu strategis tersebut akan digunakan untuk mengantisipasi berbagai masalah yang dihadapi dan untuk memberikan arah bagi perumusan berbagai program kegiatan Sekretariat Daerah pada tahun-tahun mendatang. Adapun Isu strategis yang di hadapi:

1. Penyediaan Sarana dan parasarana keagamaan;
2. Fasilitasi kegiatan sosial dan keagamaan;
3. Indentifikasi Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial dan Masyarakat;
4. Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Perekonomian;
5. Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan SDA;
6. Penyusunan dokumen perencanaan;
7. Administrasi Keuangan;
8. Fasilitasi Pengukuran kinerja;
9. Fasilitasi evaluasi Kinerja;
10. Penataan administrasi pemerintahan;



11. Pengelolaan administrasi kewilayahan;
12. Fasilitasi Pelaksanaan otonomi daerah;
13. Fasilitasi kerjasama dalam negeri;
14. Fasilitasi kerjasama luar negeri;
15. Evaluasi pelaksanaan Kerjasama;
16. Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan;
17. Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana;
18. Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi;
19. Peningkatan Sarana prasarana;
20. Pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian;
21. pelaksanaan sistem informasi kepegawaian;
22. Sosialisasi peraturan perundangan;
23. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor;
24. Fasilitasi rapat;
25. Penataan Arsip dinamis;
26. Fasilitasi kunjungan tamu.

#### **2.4 Review Terhadap Renja Murni RKPD**

Setiap program dan kegiatan yang ada di Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2025 sudah dibuat pada pertengahan tahun 2024 dan tentunya Renja tersebut masih mengacu pada Rentsra yang lama, sehingga perlu dilakukan penyesuaian untuk mewujudkan Visi Misi Bupati pada periode 2025-2029. Renja Murni tersebut telah terdapat pada SIPD dan akan menjadi patokan dalam menyusun Renja 2025 serta untuk dijadikan pedoman dalam penyusunan RKA dan selanjutnya akan disahkan menjadi DPA yang selanjutnya akan dibuat Perjanjian Kinerja atasnya Rencana Aksi Kinerja, Pengukuran, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja Tahunan.

Dalam Perubahan Renja tahun 2025 ini akan dilakukan review terhadap Renja murni RKPD yang telah ditetapkan untuk menilai apakah Renja murni yang disusun sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Hal ini untuk mencegah adanya program atau kegiatan



yang tidak diakomodir. Reviu didasarkan atas pengukuran dan evaluasi kinerja sampai dengan Triwulan III Tahun 2025 serta LHE AKIP oleh Inspektorat Kabupaten Kapuas Hulu. Review terhadap RKPD Murni dapat dilihat pada table dibawah ini:



Tabel 3 Review Terhadap Renja Murni

Kode	Renja Murni - RENSTRA Lama				Renja Perubahan - RENSTRA Baru					Catatan	
	Program/ Kegiatan/ Sub	Lokasi	Indikator	Target	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/ Sub	Lokasi	Indikator	Target		Pagu Indikatif
<b>4</b>	<b>UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN</b>				<b>68.212.609.698</b>	<b>UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN</b>					<b>109.703.382.404</b>
4.01	SEKRETARIAT DAERAH	Setda KH	Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten	3,3	68.212.609.698	SEKRETARIAT DAERAH	Setda KH	Persentase kebijakan strategis dibidang Pemerintahan yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundangan	95	109.703.382.404	
		-	-	-			Setda KH	Persentase kebijakan strategis dibidang Kesejahteraan Rakyat yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundangan	95		
		-	-	-			Setda KH	Persentase kebijakan strategis dibidang Perekonomian dan SDA yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundangan	100		
		Setda KH	Predikat SAKIP Sekretariat Daerah	BB			Setda KH	Nilai SAKIP Sekretariat Daerah	67,5		
		-	-	-			Setda KH	Persentase kebijakan strategis dibidang Administrasi Umum yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundangan	100		
		Setda KH	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Sekretariat Daerah	80,9			Setda KH	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Sekretariat Daerah	84		
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Setda KH	Persentase kebijakan strategi di bidang administrasi umum yang ditindaklanjuti	100	47.239.010.076	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Setda KH	Jumlah Kebijakan Strategis di Bidang Administrasi Umum yang ditetapkan sesuai Peraturan Perundangan	41	53.420.477.575	
4.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Setda KH	Persentase Penyusunan dokumen Perencanaan, dokumen Penganggaran dan Laporan Kinerja yang sesuai dengan pedoman teknis	100	701.249.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Setda KH	Persentase Penyusunan dokumen Perencanaan, dokumen Penganggaran dan Laporan Kinerja yang sesuai dengan pedoman teknis	100	546.415.500	
4.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Setda KH	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4	474.692.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Setda KH	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4	313.353.500	
4.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Setda KH	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan hasil koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD	1	38.514.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Setda KH	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan hasil koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD	1	19.872.000	
4.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Setda KH	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan hasil koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	1	31.717.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Setda KH	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan hasil koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	1	14.918.000	



<https://bit.ly/Renja-2025-SETDAKH>  
**Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2025**  
**Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu**

Kode	Renja Murni - RENSTRA Lama					Renja Perubahan - RENSTRA Baru					Catatan
	Program/ Kegiatan/ Sub	Lokasi	Indikator	Target	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/ Sub	Lokasi	Indikator	Target	Pagu Indikatif	
4.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Setda KH	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan hasil koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD	1	30.032.000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Setda KH	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan hasil koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD	1	15.682.000	
4.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Setda KH	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan hasil koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA SKPD	1	17.444.000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Setda KH	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan hasil koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA SKPD	1	8.038.000	
4.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Setda KH	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian ki nerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	5	90.850.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Setda KH	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian ki nerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	1	124.632.000	
4.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Setda KH	Jumlah Laporan Evaluasi Perangkat Daerah	4	18.000.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Setda KH	Jumlah Laporan Evaluasi Perangkat Daerah	4	49.920.000	
<b>4.01.01.2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Setda KH</b>	<b>Persentase Tertib Administrasi Keuangan</b>	<b>100</b>	<b>16.972.139.981</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Setda KH</b>	<b>Persentase Administrasi Keuangan sesuai Pedoman yang Berlaku</b>	<b>100</b>	<b>17.781.368.480</b>	<b>0</b>
4.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Setda KH	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	12	16.241.154.981,00	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Setda KH	Jumlah layanan Penerimaan gaji dan tunjangan ASN	12	16.463.656.480	
4.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Setda KH	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	1	263.430.000,00	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Setda KH	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	1	1.360.000	
4.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Setda KH	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	1	194.520.000,00	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Setda KH	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	1	643.538.000	
4.01.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Setda KH	Jumlah Dokumen koordinasi dan pelaksanaan Akuntansi SKPD	1	17.600.000,00	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Setda KH	Jumlah Dokumen koordinasi dan pelaksanaan Akuntansi SKPD	12	29.440.000	
4.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Setda KH	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hail Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	42.705.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Setda KH	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hail Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	17.224.000	
4.01.01.2.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Setda KH	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan tindaklanjut pemeriksaan	1	197.985.000,00	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Setda KH	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan tindaklanjut pemeriksaan	1	604.450.000	
4.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Setda KH	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4	7.600.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Setda KH	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4	17.706.000	
4.01.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Setda KH	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1	7.145.000,00	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Setda KH	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1	3.994.000	



<https://bit.ly/Renja-2025-SETDAKH>  
**Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2025**  
**Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu**

Kode	Renja Murni - RENSTRA Lama					Renja Perubahan - RENSTRA Baru					Catatan
	Program/ Kegiatan/ Sub	Lokasi	Indikator	Target	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/ Sub	Lokasi	Indikator	Target	Pagu Indikatif	
<b>4.01.01.2.03</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>Setda KH</b>	<b>Persentase Barang Milik Daerah yang dikelola dengan baik</b>	<b>95</b>	<b>521.811.000</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>Setda KH</b>	<b>Persentase Barang Milik Daerah yang dikelola dengan baik</b>	<b>95</b>	<b>507.465.400</b>	<b>0</b>
4.01.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Setda KH	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1	32.910.000,00	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Setda KH	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2	20.880.000	
4.01.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Setda KH	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1	39.315.000,00	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Setda KH	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD yang dihasilkan	2	14.600.000	
4.01.01.2.03.0003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Setda KH	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1	61.516.300,00	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Setda KH	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1	98.698.300	
4.01.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Setda KH	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1	36.981.000,00	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Setda KH	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4	22.975.000	
4.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Setda KH	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1	351.088.700,00	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Setda KH	Jumlah Dokumen Daftar Barang Sekretariat Daerah yang dihasilkan	1	350.312.100	
<b>4.01.01.2.05</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Setda KH</b>	<b>Persentase Administrasi Kepegawaian yang tepat waktu</b>	<b>90</b>	<b>744.652.000</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Setda KH</b>	<b>Persentase Administrasi Kepegawaian yang sesuai dengan pedoman berlaku</b>	<b>90</b>	<b>2.724.298.920</b>	<b>0</b>
4.01.01.2.05.0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Setda KH	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	36	120.400.000	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Setda KH	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	12	120.400.000	
4.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Setda KH	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	1	232.680.000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Setda KH	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	1	150.000.000	
4.01.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Setda KH	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi	120	108.460.000	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Setda KH	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi	12	2.208.181.920	
4.01.01.2.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Setda KH	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Siste	117	100.832.000	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Setda KH	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	12	99.815.000	
4.01.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Setda KH	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kine	117	17.150.000	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Setda KH	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	12	43.230.000	
4.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Setda KH	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	40	165.130.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Setda KH	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10	102.672.000	
<b>4.01.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Setda KH</b>	<b>Persentase Pengelolaan Administrasi Umum yang terpenuhi</b>	<b>100</b>	<b>9.716.656.250</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Setda KH</b>	<b>Persentase Pengelolaan Administrasi Umum yang terpenuhi</b>	<b>100</b>	<b>12.611.094.030</b>	<b>0</b>
4.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi	Setda KH	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	1	88.212.000	Penyediaan Komponen Instalasi	Setda KH	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	1	4.225.096.350	



Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2025  
Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu

Kode	Renja Murni - RENSTRA Lama					Renja Perubahan - RENSTRA Baru					Catatan
	Program/ Kegiatan/ Sub	Lokasi	Indikator	Target	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/ Sub	Lokasi	Indikator	Target	Pagu Indikatif	
	Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Bangunan Kantor yang Disediakan			Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Bangunan Kantor yang Disediakan			
4.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Setda KH	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang	1	39.750.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Setda KH	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	1	469.228.750	
4.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Setda KH	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1	386.953.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Setda KH	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1	601.304.000	
4.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Setda KH	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	199.681.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Setda KH	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	137.530.000	
4.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Setda KH	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1	179.279.500	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Setda KH	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1	133.011.180	
4.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Setda KH	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	30	2.117.944.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Setda KH	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	30	2.069.088.000	
4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Setda KH	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan	1500	6.533.146.750	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Setda KH	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1500	4.804.145.750	
4.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Setda KH	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1	171.690.000	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Setda KH	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1	171.690.000	
<b>4.01.01.2.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Setda KH</b>	<b>Persentase Pelaksanaan Pengadaan Barang Milik Daerah yang Terakomodir</b>	<b>100</b>	<b>3.887.532.000</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Setda KH</b>	<b>Persentase Pelaksanaan Pengadaan Barang Milik Daerah yang Terakomodir</b>	<b>100</b>	<b>3.304.424.000</b>	<b>0</b>
4.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Setda KH	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1	3.851.832.000	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Setda KH	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	15	3.065.010.000	
4.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Setda KH	Jumlah Paket Mebel yang tersedia	650	35.700.000	Pengadaan Mebel	Setda KH	Jumlah Paket Mebel yang tersedia	650	239.414.000	
<b>4.01.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Setda KH</b>	<b>Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang tersedia</b>	<b>100</b>	<b>3.826.502.000</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Setda KH</b>	<b>Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang tersedia</b>	<b>100</b>	<b>3.810.541.000</b>	<b>0</b>
4.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Setda KH	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5053	61.000.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Setda KH	Jumlah Layanan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	49.714.000	
4.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Setda KH	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	2.161.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Setda KH	Jumlah Layanan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	1.515.000.000	
4.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Setda KH	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6	925.565.000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Setda KH	Jumlah Layanan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12	924.615.000	
4.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Setda KH	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	678.937.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Setda KH	Jumlah Layanan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	1.321.212.000	



<https://bit.ly/Renja-2025-SETDAKH>  
**Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2025**  
**Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu**

Kode	Renja Murni - RENSTRA Lama					Renja Perubahan - RENSTRA Baru					Catatan
	Program/ Kegiatan/ Sub	Lokasi	Indikator	Target	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/ Sub	Lokasi	Indikator	Target	Pagu Indikatif	
4.01.01.2.09	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Setda KH	<b>Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara</b>	100	1.728.940.345	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Setda KH	<b>Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara</b>	100	1.982.991.945	0
4.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Setda KH	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	34	566.789.345	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Setda KH	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	34	973.544.945	
4.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Setda KH	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	11	686.901.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Setda KH	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	11	634.197.000	
4.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Setda KH	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2	475.250.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Setda KH	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2	375.250.000	
4.01.01.2.11	<b>Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah</b>	Setda KH	<b>Persentase Pelayanan Keuangan dan Kesejahteraan Kepala Daerah</b>	100	726.831.000	<b>Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah</b>	Setda KH	<b>Persentase Pelayanan Keuangan dan Operasional Kepala Daerah</b>	100	950.447.000	0
4.01.01.2.11.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Setda KH	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	12	207.831.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Setda KH	Jumlah Layanan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	12	480.231.000	
4.01.01.2.11.0003	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Setda KH	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	7	119.000.000	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Setda KH	Jumlah Layanan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2	66.500.000	
4.01.01.2.11.0004	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Setda KH	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2	400.000.000	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Setda KH	Jumlah Layanan Pembayaran Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	12	403.716.000	
4.01.01.2.13	Penataan Organisasi	Setda KH	Jumlah Perangkat Daerah dengan Tingkat Kematangan Tinggi melalui Penilaian Mandiri	15	750.027.000	Penataan Organisasi	Setda KH	Jumlah Kelembagaan Kabupaten yang Tepat Fungsi dan Tepat Ukuran	1	595.519.000	0
		Setda KH	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Analisis Jabatan	6			Setda KH	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Analisis Jabatan	1		
		Setda KH	Jumlah Perangkat Daerah yang telah menetapkan Standar Pelayanan Publik	7			Setda KH	Jumlah Perangkat Daerah yang telah menetapkan Standar Pelayanan Publik	6		
		Setda KH	Jumlah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Reformasi Birokrasi	6			Setda KH	Jumlah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Reformasi Birokrasi	6		



<https://bit.ly/Renja-2025-SETDAKH>  
 Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2025  
 Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu

Kode	Renja Murni - RENSTRA Lama					Renja Perubahan - RENSTRA Baru					Catatan
	Program/ Kegiatan/ Sub	Lokasi	Indikator	Target	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/ Sub	Lokasi	Indikator	Target	Pagu Indikatif	
		Setda KH	Jumlah Perangkat Daerah dengan Predikat AKIP Minimal B sesuai Hasil Evaluasi Tim APIP dari Perangkat Daerah yang dievaluasi	18			Setda KH	Jumlah Perangkat Daerah dengan Predikat AKIP Minimal B sesuai Hasil Evaluasi Tim APIP dari Perangkat Daerah yang dievaluasi	22		
4.01.01.2.13.0001	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Setda KH	Jumlah PD yang dilakukan pendampingan pengelolaan kelembagaan	22	236.085.000	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Setda KH	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Kelembagaan	1	200.259.500	
			Jumlah PD yang dilakukan pendampingan anjab	5			Setda KH	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Fasilitasi Penyusunan Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, Peta Jabatan dan Evaluasi Jabatan	50		
4.01.01.2.13.0002	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Setda KH	Jumlah PD yang dilakukan Pendampingan Ketatalaksanaan	50	238.442.000	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Setda KH	Jumlah PD yang difasilitasi dalam Bidang Ketatalaksanaan	27	189.909.500	
			Jumlah Unit Pelayanan Publik yang dilakukan Pendampingan	7			Setda KH	Jumlah Unit Pelayanan Publik yang dilakukan Fasilitasi	6		
4.01.01.2.13.0003	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Setda KH	Jumlah PD yang dilakukan pendampingan SAKIP	50	275.500.000	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Setda KH	Jumlah PD yang difasilitasi dalam Peningkatan SAKIP	50	205.350.000	
			Jumlah PD yang terlibat dalam Pelaksanaan RB sebagai Leading Sector	6			Setda KH	Jumlah PD yang difasilitasi dalam Pelaksanaan RB	6		
4.01.01.2.14	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Setda KH	Jumlah layanan Fasilitasi bagi Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Sekretaris Daerah	200	7.662.669.500	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Setda KH	Persentase Layanan Keprotokolan Pimpinan	81	8.605.912.300	0
		Setda KH	Persentase Layanan Komunikasi Pimpinan	230			Setda KH	Persentase Layanan Komunikasi Pimpinan	82		
		Setda KH	Persentase Pendokumentasian Tugas Pimpinan	200			Setda KH	Persentase Pendokumentasian Tugas Pimpinan	86		
4.01.01.2.14.0001	Fasilitasi Keprotokolan	Setda KH	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	1	3.680.730.000	Fasilitasi Keprotokolan	Setda KH	Jumlah Hasil Fasilitasi Keprotokolan	110	3.947.813.000	
4.01.01.2.14.0002	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Setda KH	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	1	961.350.500	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Setda KH	Jumlah Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	85	1.809.264.500	
4.01.01.2.14.0003	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Setda KH	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	1	3.020.589.000	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Setda KH	Jumlah Hasil Pendokumentasian Tugas Pimpinan	87	2.848.834.800	



<https://bit.ly/Renja-2025-SETDAKH>  
**Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2025**  
**Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu**

Kode	Renja Murni - RENSTRA Lama					Renja Perubahan - RENSTRA Baru					Catatan
	Program/ Kegiatan/ Sub	Lokasi	Indikator	Target	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/ Sub	Lokasi	Indikator	Target	Pagu Indikatif	
4.01.02	<b>PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT</b>	Setda KH	Persentase kebijakan strategis dibidang Pemerintahan, Hukum dan Kesejahteraan Rakyat yang ditindaklanjuti	100	18.465.299.822	<b>PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT</b>	Setda KH	Jumlah Kebijakan Strategis di Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang ditetapkan sesuai Peraturan Perundangan	19	54.630.304.029	
4.01.02.2.01	Administrasi Tata Pemerintahan	Setda KH	Persentase penyelesaian administrasi batas wilayah Kabupaten, Kecamatan dan Desa	77	642.441.500	Administrasi Tata Pemerintahan	Setda KH	Persentase peningkatan penyelesaian administrasi batas antar wilayah Kecamatan dan Kelurahan	68	540.318.500	0
		Setda KH	Persentase Peningkatan Pemutakhiran Data Rupabumi Kecamatan	74			Setda KH	Persentase Peningkatan Pemutakhiran Data Rupabumi Kecamatan	78		
		Setda KH	Persentase Jumlah Urusan pada OPD yang Menyusun LPPD sesuai petunjuk	90			Setda KH	Persentase Jumlah Urusan pada OPD yang Menyusun LPPD sesuai petunjuk	100		
4.01.02.2.01.0001	Penataan Administrasi Pemerintahan	Setda KH	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintah	2	180.742.500	Penataan Administrasi Pemerintahan	Setda KH	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintah	1	139.892.500	
4.01.02.2.01.0002	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Setda KH	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	1	138.997.000	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Setda KH	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	1	138.997.000	
4.01.02.2.01.0003	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Setda KH	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	1	322.702.000	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Setda KH	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	2	261.429.000	
4.01.02.2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Setda KH	Persentase rumusan kebijakan di bidang bina mental spiritual, kesejahteraan masyarakat, dan kesejahteraan Sosial yang ditindaklanjuti menjadi kebijakan	100	17.065.024.222	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Setda KH	Jumlah rumusan kebijakan di bidang bina mental spiritual yang ditindaklanjuti menjadi kebijakan	11	53.562.643.259	0
		Setda KH	Jumlah rumusan Kebijakan terkait Kesejahteraan Sosial yang terlaksana	100			Setda KH	Jumlah rumusan Kebijakan terkait Kesejahteraan Sosial yang terlaksana	1		
		Setda KH	Jumlah Rumusan Kebijakan Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang terlaksana	100			Setda KH	Jumlah Rumusan Kebijakan Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang terlaksana	4		
4.01.02.2.02.0001	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Setda KH	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	1	16.288.290.422	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Setda KH	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	11	53.379.886.259	



Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2025  
Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu

Kode	Renja Murni - RENSTRA Lama					Renja Perubahan - RENSTRA Baru					Catatan
	Program/ Kegiatan/ Sub	Lokasi	Indikator	Target	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/ Sub	Lokasi	Indikator	Target	Pagu Indikatif	
4.01.02.2.02.0002	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	Setda KH	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	2	487.206.800	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	Setda KH	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	1	482.352.060	
4.01.02.2.02.0003	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	Setda KH	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, TrantibumLinmas	544	289.527.000	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	Setda KH	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	4	182.757.000	
4.01.02.2.03	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Setda KH	Persentase kebijakan yang harmonis	70	624.106.100	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Setda KH	Persentase penyelesaian Proses Penyusunan produk hukum	82	393.614.270	0
		Setda KH	Persentase Fasilitasi Bantuan Hukum	90			Setda KH	Persentase Fasilitasi Bantuan Hukum	77		
		Setda KH	Persentase Publikasi dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan	90			Setda KH	Persentase Publikasi dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan	100		
4.01.02.2.03.0001	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Setda KH	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	800	342.821.000	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Setda KH	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	450	177.329.170	
4.01.02.2.03.0002	Fasilitasi Bantuan Hukum	Setda KH	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	10	150.210.000	Fasilitasi Bantuan Hukum	Setda KH	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	13	120.010.000	
4.01.02.2.03.0003	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Setda KH	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	19	131.075.100	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Setda KH	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	150	96.275.100	
4.01.02.2.04	Fasilitasi Kerja Sama Daerah	Setda KH	Persentase Kerjasama Wajib Daerah	21	133.728.000	Fasilitasi Kerja Sama Daerah	Setda KH	Persentase Kerjasama Wajib Daerah	100	133.728.000	-
4.01.02.2.04.0001	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Setda KH	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	5	133.728.000	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Setda KH	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	15	133.728.000	



<https://bit.ly/Renja-2025-SETDAKH>  
 Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2025  
 Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu

Kode	Renja Murni - RENSTRA Lama					Renja Perubahan - RENSTRA Baru					Catatan
	Program/ Kegiatan/ Sub	Lokasi	Indikator	Target	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/ Sub	Lokasi	Indikator	Target	Pagu Indikatif	
4.01.03	<b>PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN</b>	Setda KH	<b>Persentase kebijakan strategi dibidang Perekonomian yang ditindaklanjuti</b>	100	2.508.299.800	<b>PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN</b>	Setda KH	<b>Jumlah Kebijakan Strategis di Bidang Perekonomian, Pembangunan, SDA dan PBJ yang ditetapkan sesuai Peraturan Perundangan</b>	19	1.652.600.800	0
4.01.03.2.01	<b>Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian</b>	Setda KH	<b>Persentase rekomendasi kebijakan perekonomian yang di tindaklanjuti</b>	100	346.885.300	<b>Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian</b>	Setda KH	<b>Persentase kebijakan perekonomian yang di tindaklanjuti</b>	100	318.331.000	0
4.01.03.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Setda KH	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	4	112.955.000	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Setda KH	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	2	143.889.500	
4.01.03.2.01.0002	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Setda KH	Jumlah Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	4	77.537.000	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Setda KH	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	2	77.301.000	
4.01.03.2.01.0003	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	Setda KH	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan	1	52.131.000	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	Setda KH	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	1	27.412.000	
4.01.03.2.01.0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD	Setda KH	Jumlah Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD	1	52.131.300	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD	Setda KH	Jumlah Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD	1	29.492.500	
4.01.03.2.01.0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	Setda KH	Jumlah Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	2	52.131.000	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	Setda KH	Jumlah Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	1	40.236.000	
4.01.03.2.02	<b>Pelaksanaan Administrasi Pembangunan</b>	Setda KH	<b>Persentase rekomendasi kebijakan Administrasi Pembangunan yang di tindaklanjuti</b>	100	196.292.200	<b>Pelaksanaan Administrasi Pembangunan</b>	Setda KH	<b>Persentase kebijakan Administrasi Pembangunan yang di tindaklanjuti</b>	100	115.564.300	0
4.01.03.2.02.0001	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Setda KH	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	4	41.676.500	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Setda KH	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	1	29.173.500	
4.01.03.2.02.0002	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Setda KH	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	4	47.081.700	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Setda KH	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	1	32.957.000	
4.01.03.2.02.0003	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Setda KH	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan	100	107.534.000	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Setda KH	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan	1	53.433.800	



<https://bit.ly/Renja-2025-SETDAKH>  
**Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2025**  
**Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu**

Kode	Renja Murni - RENSTRA Lama					Renja Perubahan - RENSTRA Baru					Catatan
	Program/ Kegiatan/ Sub	Lokasi	Indikator	Target	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/ Sub	Lokasi	Indikator	Target	Pagu Indikatif	
4.01.03.2.03	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa 1	Setda KH	Persentase capaian efisiensi dan efektifitas pada pengadaan barang dan jasa dengan metode pemilihan tender/seleksi dan e-purchasing	80	1.812.996.000	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa 1	Setda KH	Persentase capaian layanan pengadaan barang dan jasa dengan metode pemilihan tender/seleksi dan e-purchasing	100	1.134.056.900	0
		Setda KH	Jumlah Penerima Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Secara Elektronik	50			Setda KH	Jumlah Penerima Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Secara Elektronik	210		
4.01.03.2.03.0001	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Setda KH	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	525	1.208.268.800	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Setda KH	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	74	709.940.000	
4.01.03.2.03.0002	Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	Setda KH	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	78	377.389.100	Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	Setda KH	Jumlah Pengguna yang mendapatkan layanan Pengadaan barang/jasa secara eletronik	210	269.055.200	
4.01.03.2.03.0003	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Setda KH	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	60	227.338.100	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Setda KH	Jumlah yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	50	155.061.700	
4.01.03.2.04	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Setda KH	Persentase rekomendasi Kebijakan Sumber Daya Alam yang di tindaklanjuti	100	152.126.300	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Setda KH	Persentase rekomendasi Kebijakan Sumber Daya Alam yang di tindaklanjuti	100	84.648.600	0
4.01.03.2.04.0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Setda KH	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	4	52.131.300	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Setda KH	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Kehutanan, Perikanan	1	29.492.000	
4.01.03.2.04.0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Setda KH	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian	2	52.131.000	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Setda KH	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan, Sumber Daya Mineral dan Lingkungan Hidup	1	29.491.800	



<https://bit.ly/Renja-2025-SETDAKH>  
Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2025  
Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu

Kode	Renja Murni - RENSTRA Lama					Renja Perubahan - RENSTRA Baru					Catatan
	Program/ Kegiatan/ Sub	Lokasi	Indikator	Target	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/ Sub	Lokasi	Indikator	Target	Pagu Indikatif	
4.01.03.2.04.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Setda KH	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan	2	47.864.000	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Setda KH	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air	1	25.664.800	

Keterangan Warna:



Menjadi Bahan Evaluasi atau mengalami perbaikan



Berdasarkan dari tabel tersebut diatas maka diuraikan sebagai berikut :

1. Semula indikator SAKIP yaitu Predikat SAKIP Sekretariat Daerah dan berubah menjadi Nilai SAKIP Sekretariat Daerah. Perubahan tersebut didasarkan atas hasil evaluasi dan Reviu terhadap Rancangan Akhir Renstra 2025-2029 bahwa terdapat berbagai perbedaan terhadap indikator pada setiap OPD. Sehingga perlu dilakukan penyeragaman untuk seluruh SKPD. Masalah lainnya juga terkait sistem yang diinputkan pada <https://sipd-ri.kemendagri.go.id/renstra> mewajibkan penginputan seluruh Renstra pada sistem tersebut. Terkait untuk indikator SAKIP tidak bisa dilakukan penginputan berupa predikat, hanya bisa dimasukan berupa angka. Sehingga dari kedua permasalahan tersebut maka Indikator ditetapkan menjadi Nilai SAKIP dengan tergat berupa nilai angka numerik.
2. Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat dilakukan penyesuaian target dengan menentukan tren capaian untuk beberapa tahun terakhir. Melihat trend 5 tahun terakhir pada Tahun 2021 dengan nilai 81,46, 2022 dengan nilai -, 2023 dengan nilai 83,84, 2024 dengan nilai 87,78, 2025 pada semester 1 dengan nilai 85,90. Dengan melihat tren tersebut terdapat nilai yang turun naik sehingga menetapkan target dengan mengambil nilai rata-rata dari setiap nilai 4 tahun terakhir dengan nilai rata-rata 84,75. sehingga ditetapkan target nilai pada tahun 2025 sebesar 84, pada Tahun 2026 dengan target nilai 85, Tahun 2027 dengan target nilai 86, Tahun 2028 dengan target nilai 87 dan Tahun 2029 dengan target nilai 88;
3. Indikator Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan hasil koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA SKPD semula ditargetkan sebanyak 3 Dokumen yaitu berupa dokumen Pergeseran pertama dan pergeseran kedua. Namun berdasarkan hasil rapat evaluasi dan kesepakatan bersama bahwa dokumen pergeseran/ penyempurnaan bukan merupakan dokumen perubahan anggaran, sehingga selanjutnya ditetapkan menjadi 1 dokumen DPA Perubahan;
4. Dokumen RKBMD semula ditargetkan hanya melaporkan 1 dokumen saja sampai dengan akhir tahun. Namun RKBMD dilaporkan setiap semester terhadap kebutuhan barang/ asset.



5. Persentase Publikasi dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan. Ada beberapa item yg ditambahkan dalam aplikasi JDIH seperti PP, Permendagri, UU dan Perdes sehingga perlu melakukan perubahan terhadap target.
6. Indikator Jumlah Penerima Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Secara Elektronik juga dilakukan penyesuaian terhadap targetnya. Faktor-faktor capaian antara lain :
  - Terjadi Masa Transisi Katalog Elektronik Versi 5 ke Versi 6 sehingga banyak pengguna verifikasi ulang Akun yang bersangkutan;
  - Perpanjangan akun non penyedia PPK dan PP Tahun 2025 Setelah di non aktif secara otomatis oleh sistem per 31 Desember 2024;
  - Perubahan Domain website <https://lpse.kapuashulukab.go.id/> menjadi <https://spse.inaproc.id/kapuashulukab/> sehingga semua Akun Pengguna LPSE di non aktifkan oleh sistem, jika ingin mengaktifkan lagi yang bersangkutan harus verifikasi ulang data yang bersangkutan dengan melengkapi persyaratan yang ditentukan Tim LPSE kabupaten Kapuas Hulu;
  - Banyak Pengguna LPSE memerlukan pendampingan dalam Inputan RUP dan pembuatan Akun Katalog Inaproc;
  - Banyak Pengguna LPSE mengalami masalah berkenaan Akses Akun yang bersangkutan dan masalah terkait transaksi proses belanja pada Katalog Versi 6.
7. Indikator Persentase Kerjasama Wajib Daerah juga mengalami perubahan terhadap targetnya. Sampai dengan triwulan III sudah masuk draf sebanyak sembilan kerjasama, kemungkinan akan melebihi target apabila tidak melakukan penyesuaian. Hal ini terkait adanya Perjanjian Kerjasama terhadap Pkerja migran;
8. Indikator Jumlah Kelembagaan Kabupaten yang Tepat Fungsi dan Tepat Ukuran terdapat penyesuaian dari target semula. Perubahan dinamis aturan sehingga berdasarakan telaahan, OPD menjadi Perbup SOTK. Kominfo skornya msih kurang penetapan urusan. Kendalanya target yang awalnya 2 PD disesuaikan menjadi 1 PD;



9. Indikator Jumlah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Reformasi Birokrasi Ternyata grand dan roadmap belum selesai sehingga di sesuaikan menjadi 6 PD saja.



## BAB III

### TUJUAN DAN SASARAN SEKRETARIAT DAERAH

#### 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Pembangunan nasional merupakan upaya semua komponen bangsa yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan bernegara sebagaimana diamanatkan oleh Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan berdasarkan Pancasila. Pencapaian tujuan ini dilaksanakan secara bertahap, mulai dari jangka panjang, jangka menengah, hingga tahunan.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025-2045 menggariskan Visi Indonesia tahun 2025 yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Bersatu, Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan. Dengan Misi:

- Transformasi sosial;
- Transformasi ekonomi;
- Transformasi tata Kelola;
- Supremasi hukum, stabilitas, dan kepemimpinan Indonesia;
- Ketahanan sosial budaya dan ekologi;
- Pembangunan kewilayahan yang merata dan berkeadilan;
- Sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan;
- Kestinambungan Pembangunan.

#### 3.2 Tujuan dan Sasaran Sekretariat Daerah

Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih adalah **“Terwujudnya Kapuas Hulu SEMAKIN HEBAT (Semakin Harmonis, Semakin Energik, Semakin Berdaya Saing, Semakin Amanah dan Semakin Terampil)”**. Visi tersebut mengandung lima elemen utama pembangunan Kabupaten Kapuas Hulu yaitu Harmonis, Energik, Berdaya saing, Amanah, dan Terampil sebagaimana dijabarkan pada penjelasan di bawah ini:



1. **Semakin Harmonis:** Mengedepankan nilai etika, moral, dan norma dalam Masyarakat.
2. **Semakin Energik:** meningkatkan kesejahteraan Masyarakat melalui peningkatan Kesehatan, Pembangunan keolahragaan, dan pendapatan per kapita.
3. **Semakin Berdaya saing:** mewujudkan pertumbuhan ekonomi, sosial dan lingkungan yang lebih baik, didukung SDM yang unggul.
4. **Semakin Amanah:** mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang baik, bersih dan bebas KKN.
5. **Semakin Terampil:** Meningkatkan kualitas SDM yang handal, kreatif, inovatif, dan produktif.

Dalam rangka mewujudkan **Visi** tersebut maka telah ditetapkan berbagai **Misi** Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2025-2029 yaitu sebagai berikut :

- 1) Mewujudkan Masyarakat Kapuas Hulu yang harmonis dalam kehidupan beragama, berbudaya, sosial dan keamanan;
- 2) Mewujudkan Kapuas Hulu yang energik menuju masyarakat produktif, mandiri, partisipatif, berkeadilan serta ramah investasi dan ramah lingkungan;
- 3) Mewujudkan masyarakat Kapuas Hulu yang sehat, berdaya saing, cerdas dan inovatif dengan meningkatkan kualitas Pendidikan;
- 4) Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang profesional, berintegritas, tertib, transparan dan akuntabilitas;
- 5) Mewujudkan Sumber Daya Manusia Kapuas Hulu yang berkualitas dan terampil melalui pelatihan serta penyediaan sarana dan prasarana pendukungnya

Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu memiliki keterkaitan tugas dan fungsi dengan beberapa misi yaitu misi yang **Pertama**, **Kedua** dan **Keempat**.



Penetapan tujuan pada umumnya didasarkan kepada faktor-faktor kunci keberhasilan yang dilakukan untuk pencapaian visi dan misi. Tujuan tidak harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, akan tetapi harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program, dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi. Sebab itu, tujuan harus dapat menyediakan dasar yang kuat untuk menetapkan indikator kinerja.

Adapun tujuan strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu yang telah ditetapkan sebagai berikut:

1. **Meningkatkan kondusivitas wilayah;**
2. **Meningkatkan nilai tambah ekonomi dan produktivitas sektor pertanian, perikanan, perindustrian, perdagangan dan pariwisata;**
3. **Meningkatkan akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;** dan
4. **Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik yang Prima.**

Untuk mencapai tujuan diatas harus ditentukan pula sasaran yang akan menunjang tercapainya tujuan tersebut. Sasaran merupakan perwujudan dari misi yang pencapaiannya diharapkan dalam kurun waktu satu tahunan dapat terlaksana. Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu telah menetapkan 5 (lima) sasaran sebagai berikut:

**Sasaran Pertama :**

**“Meningkatnya Kualitas Kebijakan dibidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat”** dengan indikator sasaran adalah:

1. Persentase kebijakan strategis dibidang Pemerintahan yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundangan;
2. Persentase kebijakan strategis dibidang Kesejahteraan Rakyat yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundangan;



**Sasaran Kedua :**

**“Meningkatnya Kualitas Kebijakan diBidang Perekonomian dan SDA”**, dengan indikator sasaran adalah Persentase kebijakan strategis dibidang Perekonomian dan SDA yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundangan.

**Sasaran Ketiga :**

**“Meningkatnya Akuntabilitas kinerja Sekretariat Daerah”**, dengan indikator sasaran adalah Nilai SAKIP Sekretariat Daerah.

**Sasaran Keempat :**

**“Meningkatnya Kualitas Kebijakan dibidang Administrasi Umum”**, dengan indikator sasaran adalah Persentase kebijakan strategis dibidang Administrasi Umum yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundangan.

**Sasaran Kelima :**

**“Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik pada Sekretariat Daerah”**, dengan indikator sasaran adalah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Sekretariat Daerah.

Adapun Tujuan dan Sasaran Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu pada Tahun 2025 sesuai dengan tabel dibawah ini :

Tabel 4 Tujuan dan Sasaran Sekretariat Daerah Kab. Kapuas Hulu

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target
1	Meningkatkan kondusivitas wilayah	Meningkatnya Kualitas Kebijakan dibidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase kebijakan strategis dibidang Pemerintahan yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundangan	95,00
			Persentase kebijakan strategis dibidang Kesejahteraan Rakyat yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundangan	95,00
2	Meningkatkan nilai tambah ekonomi dan produktivitas sektor pertanian, perikanan, perindustrian, perdagangan dan pariwisata	Meningkatnya Kualitas Kebijakan diBidang Perekonomian dan SDA	Persentase kebijakan strategis dibidang Perekonomian dan SDA yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundangan	100,00



No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target
3	Meningkatkan akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Meningkatnya Akuntabilitas kinerja Sekretariat Daerah	Nilai SAKIP Sekretariat Daerah	68
		Meningkatnya Kualitas Kebijakan dibidang Administrasi Umum	Persentase kebijakan strategis dibidang Administrasi Umum yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundangan	100,00
4	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik yang Prima	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik pada Sekretariat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Sekretariat Daerah	84,00

Sumber: <https://docs.google.com/spreadsheets/d/1AEmSX8GtZlr4Psc5KXxjNd0lt-W2edNWu7ET8IURHsU/edit?gid=0#gid=0>

### 3.3 Program dan Kegiatan

Untuk mencapai tujuan dan sasaran di tahun 2025 Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu menetapkan 3 program dan 19 Kegiatan dengan 77 Sub Kegiatan.

Table 5 Program dan Kegiatan dan Target Capaian Kinerja Renja

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Realisasi 2024	Satuan	2025		2026		Penanggung Jawab
							Target	Rp	Target	Rp	
SEKRETARIAT DAERAH								109.703.382.404		100.626.425.229	
Meningkatkan kondusivitas wilayah				Persentase Konflik sosial yang tertangani	100	%	100		100		RPJMD
Meningkatkan kondusivitas wilayah	Meningkatnya Kualitas Kebijakan dibidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat			Persentase kebijakan strategis dibidang Pemerintahan yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundangan	100	%	95	54.630.304.029	96	51.279.649.463	SEKDA
				Persentase kebijakan strategis Rakyat yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundangan	100	%	95		95		SEKDA
	4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Jumlah Kebijakan Strategis di Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang ditetapkan sesuai Peraturan Perundangan	541	Kbjkn	19	54.630.304.029	19	51.279.649.463	ASISTEN PEM KESRA	
	4.01.02.2.01	Administrasi Tata Pemerintahan	Persentase peningkatan penyelesaian administrasi batas antar wilayah Kecamatan dan Kelurahan	53,59	%	68	540.318.500	68	617.829.231	TAPEM	
			Persentase Peningkatan Pemutakhiran Data Rupabumi Kecamatan	86,96	%	78		TAPEM			
			Persentase Jumlah Urusan pada OPD yang Menyusun LPPD sesuai petunjuk	100	%	100		TAPEM			
	4.01.02.2.01.0001	Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintah	2	Dok	1	139.892.500	1	160.384.050	TAPEM	
	4.01.02.2.01.0002	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	1	Dok	1	138.997.000	1	146.411.663	TAPEM	
4.01.02.2.01.0003	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	1	Dok	2	261.429.000	2	311.033.518	TAPEM		



Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2025  
Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Realisasi 2024	Satuan	2025		2026		Penanggung Jawab
							Tar get	Rp	Tar get	Rp	
		4.01.02.2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Jumlah rumusan kebijakan di bidang bina mental spiritual yang ditindaklanjuti menjadi kebijakan	17	Kebijakan	11	53.562.643.259	11	49.637.643.748	KESRA
				Jumlah rumusan Kebijakan terkait Kesejahteraan Sosial yang terlaksana	4	Kebijakan	1		KESRA		
				Jumlah Rumusan Kebijakan Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang terlaksana	6	Kebijakan	4		KESRA		
		4.01.02.2.02.0001	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	325	Dok	11	53.379.886.259	11	48.864.554.320	KESRA
		4.01.02.2.02.0002	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	101	Dok	1	207.507.200	1	484.775.940	KESRA
		4.01.02.2.02.0003	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	2	Dok	4	182.757.000	4	288.313.489	KESRA
		4.01.02.2.03	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Persentase penyelesaian Proses Penyusunan produk hukum	82,125	%	82	393.614.270	83	869.735.570	HUKUM
				Persentase Fasilitasi Bantuan Hukum	86,67	%	77		HUKUM		
				Persentase Publikasi dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan	50	%	100		HUKUM		
		4.01.02.2.03.0001	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	618	Dok	450	177.329.170	650	423.602.843	HUKUM
		4.01.02.2.03.0002	Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	10	Kasus	13	120.010.000	10	288.899.245	HUKUM
		4.01.02.2.03.0003	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	21	Produk Huk	150	96.275.100	150	157.233.482	HUKUM
		4.01.02.2.04	Fasilitasi Kerja Sama Daerah	Persentase Kerjasama Wajib Daerah	91,3	%	100	133.728.000	100	154.440.915	TAPEM
		4.01.02.2.04.0001	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	21	Dok	15	133.728.000	10	154.440.915	TAPEM
		Meningkatkan nilai tambah ekonomi dan produktivitas sektor pertanian, perikanan, perindustrian, perdagangan dan pariwisata	Meningkatnya Kualitas Kebijakan diBidang Perekonomian dan SDA	PDRB Per Kapita		0,44	%	2,1		2,45	
Meningkatnya Kualitas Kebijakan diBidang Perekonomian dan SDA				Persentase kebijakan strategis di bidang Perekonomian dan SDA yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundangan	87,5	%	100	1.652.600.800	100	4.374.401.350	SEKDA
4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN			Jumlah Kebijakan Strategis di Bidang Perekonomian, Pembangunan, SDA dan PBJ yang ditetapkan sesuai Peraturan Perundangan	24	Dok	19	1.652.600.800	19	4.374.401.350	ASISTEN EKBAN G
4.01.03.2.01	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian			Persentase kebijakan perekonomian yang ditindaklanjuti	100	%	100	318.331.000	100	1.216.980.050	EKBAN G SDA
4.01.03.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	4	Dok	2	143.889.500	2	313.142.500	EKBAN G SDA
4.01.03.2.01.0002	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	4	Lap	2	77.301.000	2	397.650.000	EKBAN G SDA		



Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2025  
Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Realisasi 2024	Satuan	2025		2026		Penanggung Jawab
							Target	Rp	Target	Rp	
		4.01.03.2.01.0003	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	1	Dok	1	27.412.000	1	145.200.000	EKBAN G SDA
		4.01.03.2.01.0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD	Jumlah Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD	1	dok	1	29.492.500	1	143.000.000	EKBAN G SDA
		4.01.03.2.01.0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	Jumlah Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	2	Dok	1	40.236.000	1	217.987.550	EKBAN G SDA
		4.01.03.2.02	<b>Pelaksanaan Administrasi Pembangunan</b>	<b>Persentase kebijakan Administrasi Pembangunan yang di tindaklanjuti</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>115.564.300</b>	<b>100</b>	<b>525.129.000</b>	<b>EKBAN G SDA</b>
		4.01.03.2.02.0001	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	4	Dok	1	29.173.500	1	141.621.000	EKBAN G SDA
		4.01.03.2.02.0002	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	4	Lap	1	32.957.000	1	181.062.000	EKBAN G SDA
		4.01.03.2.02.0003	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan	100	Lap	1	53.433.800	1	202.446.000	EKBAN G SDA
		4.01.03.2.03	<b>Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa 1</b>	<b>Persentase capaian layanan pengadaan barang dan jasa dengan metode pemilihan tender/seleksi dan e-purchasing</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>1.134.056.900</b>	<b>100</b>	<b>2.192.292.300</b>	<b>PBJ</b>
				<b>Jumlah Penerima Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Secara Elektronik</b>	<b>50</b>	<b>Pengguna Layanan</b>	<b>210</b>		<b>210</b>		<b>PBJ</b>
		4.01.03.2.03.0001	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa 1	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	544	Dok	74	709.940.000	65	1.527.092.380	PBJ
		4.01.03.2.03.0002	Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	Jumlah Pengguna yang mendapatkan layanan Pengadaan barang/jasa secara elektronik	78	Pengguna Layanan	210	269.055.200	210	415.128.010	PBJ
		4.01.03.2.03.0003	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	60	Orang	50	155.061.700	65	250.071.910	PBJ
		4.01.03.2.04	<b>Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam</b>	<b>Persentase rekomendasi Kebijakan Sumber Daya Alam yang di tindaklanjuti</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>84.648.600</b>	<b>100</b>	<b>440.000.000</b>	<b>EKBAN G SDA</b>
		4.01.03.2.04.0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Kehutanan, Perikanan	4	Dok	1	29.492.000	1	165.000.000	EKBAN G SDA
		4.01.03.2.04.0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan, Sumber Daya Mineral dan Lingkungan Hidup	2	Dok	1	29.491.800	1	165.000.000	EKBAN G SDA
		4.01.03.2.04.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air	2	Dok	1	25.664.800	1	110.000.000	EKBAN G SDA
		Meningkatkan akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah				Nilai SAKIP	60,4	Predikat	70		73
Meningkatnya Akuntabilitas kinerja Sekretariat Daerah			Nilai SAKIP Sekretariat Daerah	60,4	Nilai	67,5		70		SEKDA	
Meningkatnya Kualitas Kebijakan dibidang Administrasi Umum			Persentase kebijakan strategis dibidang Administrasi Umum yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundangan	100	%	100	53.420.477.57 <sup>5</sup>	100	44.972.374.41 <sup>6</sup>	SEKDA	
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Jumlah Kebijakan Strategis di Bidang Administrasi Umum yang ditetapkan sesuai Peraturan Perundangan	12	-	41,00	53.420.477.57 <sup>5</sup>	30,00	44.972.374.41 <sup>6</sup>	ASISTEN ADUM	
4.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase Penyusunan dokumen Perencanaan, dokumen Penganggaran dan Laporan Kinerja yang sesuai dengan pedoman teknis	91,89	%	100	546.415.500	100	794.275.758	PERKEU	
4.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	Dok	4	313.353.500	4	524.664.495	PERKEU	
4.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan hasil koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD	1	Dok	1	19.872.000	1	42.948.678	PERKEU	
4.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan hasil koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	1	Dok	1	14.918.000	1	32.443.965	PERKEU		
4.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan hasil koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD	1	Dok	1	15.682.000	1	32.620.080	PERKEU		



Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2025  
Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Realisasi 2024	Satuan	2025		2026		Penang gung Jawab
							Tar get	Rp	Tar get	Rp	
		4.01.01. 2.01.000 5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan hasil koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA SKPD	1	Dok	1	8.038.000	1	17.848.310	PERKE U
		4.01.01. 2.01.000 6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian ki nerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	5	Lap	1	124.632.000	1	109.886.805	PERKE U
		4.01.01. 2.01.000 7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Perangkat Daerah	1	Lap	4	49.920.000	4	30.163.425	PERKE U
		<b>4.01.01. 2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Administrasi Keuangan sesuai Pedoman yang Berlaku</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>17.781.368.480</b>	<b>100</b>	<b>13.697.020.414</b>	<b>PERKE U</b>
		4.01.01. 2.02.000 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah layanan Penerimaan gaji dan tunjangan ASN	12	Bln	12	16.463.656.480	12	12.390.249.104	PERKE U
		4.01.01. 2.02.000 2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	1	Dok	1	1.360.000	1	208.167.930	PERKE U
		4.01.01. 2.02.000 3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	1	Dok	1	643.538.000	1	792.736.400	PERKE U
		4.01.01. 2.02.000 4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen koordinasi dan pelaksanaan Akuntansi SKPD	1	Dok	12	29.440.000	12	30.181.335	PERKE U
		4.01.01. 2.02.000 5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	Lap	1	17.224.000	1	45.299.365	PERKE U
		4.01.01. 2.02.000 6	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan tindaklanjut pemeriksaan	1	Dok	1	604.450.000	1	190.884.780	PERKE U
		4.01.01. 2.02.000 7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	4	Lap	4	17.706.000	4	32.697.690	PERKE U
		4.01.01. 2.02.000 8	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1	Dok	1	3.994.000	1	6.803.810	PERKE U
		<b>4.01.01. 2.03</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Barang Milik Daerah yang dikelola dengan baik</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>95</b>	<b>507.465.400</b>	<b>95</b>	<b>409.807.250</b>	<b>UMUM</b>
		4.01.01. 2.03.000 1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1	Dok	2	20.880.000	2	32.660.000	UMUM
		4.01.01. 2.03.000 2	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD yang dihasilkan	1	Dok	2	14.600.000	2	40.841.000	UMUM
		4.01.01. 2.03.000 3	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1	Lapor an	1	98.698.300	1	51.804.000	UMUM
		4.01.01. 2.03.000 5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1	Lapor an	4	22.975.000	4	36.525.000	UMUM
		4.01.01. 2.03.000 6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Dokumen Daftar Barang Sekretariat Daerah yang dihasilkan	1	Lapor an	1	350.312.100	1	247.977.250	UMUM
		<b>4.01.01. 2.05</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Administrasi Kepegawaian yang sesuai dengan pedoman berlaku</b>	<b>99,61</b>	<b>%</b>	<b>90</b>	<b>2.724.298.920</b>	<b>90</b>	<b>3.672.181.000</b>	<b>UMUM</b>
		4.01.01. 2.05.000 1	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	12	Bulan	12	120.400.000	12	120.400.000	UMUM
		4.01.01. 2.05.000 2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1	Paket	1	150.000.000	1	135.000.000	UMUM
		4.01.01. 2.05.000 3	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi	12	Bln	12	2.208.181.920	12	3.161.250.000	UMUM
		4.01.01. 2.05.000 4	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	12	Bln	12	99.815.000	12	30.788.000	UMUM
		4.01.01. 2.05.000 5	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	12	Bln	12	43.230.000	12	15.000.000	UMUM



Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2025  
Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Realisasi 2024	Satuan	2025		2026		Penang gung Jawab
							Tar get	Rp	Tar get	Rp	
		4.01.01. 2.05.000 9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10	Orang	10	102.672.000	10	209.743.000	UMUM
		<b>4.01.01. 2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Pengelolaan Administrasi Umum yang terpenuhi</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>12.611.094.030</b>	<b>100</b>	<b>10.239.855.600</b>	<b>UMUM</b>
		4.01.01. 2.06.000 1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	Paket	1	4.225.096.350	1	145.000.000	UMUM
		4.01.01. 2.06.000 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	Paket	1	469.228.750	1	284.400.000	UMUM
		4.01.01. 2.06.000 3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1	Paket	1	601.304.000	1	566.953.000	UMUM
		4.01.01. 2.06.000 4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1,3	Paket	1	137.530.000	1	215.000.000	UMUM
		4.01.01. 2.06.000 5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1,13	Paket	1	133.011.180	1	204.651.600	UMUM
		4.01.01. 2.06.000 8	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	30	Kunjungan	30	2.069.088.000	30	2.117.944.000	UMUM
		4.01.01. 2.06.000 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1500	Laporan	1500	4.804.145.750	1500	6.533.152.000	UMUM
		4.01.01. 2.06.001 0	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1	Dok.	1	171.690.000	1	172.755.000	UMUM
		<b>4.01.01. 2.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase Pelaksanaan Pengadaan Barang Milik Daerah yang Terakomodir</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>3.304.424.000</b>	<b>100</b>	<b>551.400.000</b>	<b>UMUM</b>
		4.01.01. 2.07.000 2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1	Unit	15	3.065.010.000	1	520.000.000	UMUM
		4.01.01. 2.07.000 5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang tersedia	650	Unit	650	239.414.000	650	31.400.000	UMUM
		<b>4.01.01. 2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang tersedia</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>3.810.541.000</b>	<b>100</b>	<b>3.822.937.175</b>	<b>UMUM</b>
		4.01.01. 2.08.000 1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Layanan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5053	Bulan	12	49.714.000	5053	61.000.000	UMUM
		4.01.01. 2.08.000 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Layanan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Bulan	12	1.515.000.000	12	2.161.000.000	UMUM
		4.01.01. 2.08.000 3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Layanan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6	Bulan	12	924.615.000	6	920.937.175	UMUM
		4.01.01. 2.08.000 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Layanan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Bulan	12	1.321.212.000	12	680.000.000	UMUM
		<b>4.01.01. 2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>1.982.991.945</b>	<b>100</b>	<b>2.518.273.750</b>	<b>UMUM</b>
		4.01.01. 2.09.000 2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	34	Unit	34	973.544.945	39	1.299.975.000	UMUM
		4.01.01. 2.09.000 6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	11	Unit	11	634.197.000	11	693.048.750	UMUM
		4.01.01. 2.09.000 9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2	Unit	2	375.250.000	2	525.250.000	UMUM
		<b>4.01.01. 2.11</b>	<b>Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah</b>	<b>Persentase Pelayanan Keuangan dan Operasional Kepala Daerah</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>950.447.000</b>	<b>100</b>	<b>726.831.000</b>	<b>UMUM</b>
		4.01.01. 2.11.000 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Layanan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	24	Bulan	12	480.231.000	12	207.831.000	UMUM
		4.01.01. 2.11.000 3	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Layanan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	0	Layanan	2	66.500.000	7	119.000.000	UMUM
		4.01.01. 2.11.000 4	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Layanan Pembayaran Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2	Bulan	12	403.716.000	2	400.000.000	UMUM



Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2025  
Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Realisasi 2024	Satuan	2025		2026		Penang gung Jawab
							Tar get	Rp	Tar get	Rp	
		4.01.01. 2.13	Penataan Organisasi	Jumlah Kelembagaan Kabupaten yang Tepat Fungsi dan Tepat Ukuran	-	PD	1	595.519.000	3	746.276.865	ORGANI SASI
				Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Analisis Jabatan	-	Dok	1		1		ORGANI SASI
				Jumlah Perangkat Daerah yang telah menetapkan Standar Pelayanan Publik	7	PD	6		10		ORGANI SASI
				Jumlah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Reformasi Birokrasi	6	PD	6		8		ORGANI SASI
				Jumlah Perangkat Daerah dengan Predikat AKIP Minimal B sesuai Hasil Evaluasi Tim APIP dari Perangkat Daerah yang dievaluasi	20	PD	22		23		ORGANI SASI
		4.01.01. 2.13.000 1	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Kelembagaan	-	Dok	1	200.259.500	1	234.904.575	ORGANI SASI
				Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Fasilitasi Penyusunan Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, Peta Jabatan dan Evaluasi Jabatan	5	PD	50		50		ORGANI SASI
		4.01.01. 2.13.000 2	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah PD yang difasilitasi dalam Bidang Ketatalaksanaan	50	PD	27	189.909.500	27	237.249.790	ORGANI SASI
				Jumlah Unit Pelayanan Publik yang dilakukan Fasilitasi	7	PD	6		10		ORGANI SASI
		4.01.01. 2.13.000 3	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah PD yang difasilitasi dalam Peningkatan SAKIP	50	PD	50	205.350.000	50	274.122.500	ORGANI SASI
				Jumlah PD yang difasilitasi dalam Pelaksanaan RB	6	PD	6		8		ORGANI SASI
		4.01.01. 2.14	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Persentase Layanan Keprotokolan Pimpinan	98	%	81	8.605.912.300	82	7.793.515.605	PROKO PIM
				Persentase Layanan Komunikasi Pimpinan	98,26	%	82		83		PROKO PIM
				Persentase Pendokumentasian Tugas Pimpinan	98,00	%	86		87		PROKO PIM
		4.01.01. 2.14.000 1	Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Hasil Fasilitasi Keprotokolan	1	Lyn	110	3.947.813.000	112	3.457.375.255	PROKO PIM
		4.01.01. 2.14.000 2	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	1	Lyn	85	1.809.264.500	87	918.498.430	PROKO PIM
		4.01.01. 2.14.000 3	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Hasil Pendokumentasian Tugas Pimpinan	1	Lyn	87	2.848.834.800	82	3.417.641.920	PROKO PIM
Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik yang Prima				Indeks Kepuasan Masyarakat	82,74	Indeks	82,9	0	83,4	0	RPJMD
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik pada Sekretariat Daerah				Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Sekretariat Daerah	87,78	Nilai	84	0	85	0	PERKE U



## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Dalam upaya meningkatkan dan menciptakan kinerja OPD yang lebih efektif, optimal dan mencapai sasaran, maka Sekretariat Daerah menyusun perubahan rencana kerja yang dituangkan dalam wujud dokumen Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2025, yang berlaku selama 1 (satu) tahun anggaran, yakni mulai awal tahun hingga akhir tahun 2025. Dokumen ini menjelaskan perihal prioritas pembangunan yang akan menjadi fokus program tahun 2025 beserta sasaran, arah kebijakan dan berbagai indikasi kegiatan untuk mencapainya.

Rencana Kerja adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode satu tahun. Perubahan Renja Sekretariat Daerah Tahun 2025 disusun dengan mengacu pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah Perubahan (RKPDP) tahun 2025 dan berpedoman pada Renstra Sekretariat Daerah tahun 2025-2029. Renja Sekretariat Daerah Tahun 2025 memuat program, kegiatan, sub kegiatan, lokasi kegiatan, indikator kinerja program dan kegiatan, kelompok sasaran, dan pendanaan.

Selanjutnya Sekretaris Daerah selaku Kepala Sekretariat Daerah beserta segenap Kepala Bagian dan Staf akan melaksanakan program-program kegiatan sesuai dengan perencanaan kegiatan yang telah dituangkan dalam Perubahan Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2025. Dalam kaitan itu, diharapkan kepada Bupati selaku Kepala Daerah serta Wakil Bupati Kapuas Hulu dapat memberikan dukungan sepenuhnya agar program-program yang telah disusun dapat direalisasikan secara optimal dan mencapai sasaran sebagaimana yang dicita-citakan.

Selain itu, perlu adanya sikap mental, tekad, semangat, ketaatan, keinginan untuk maju serta disiplin dari semua pihak sehingga pada akhirnya nanti terwujud pelaksanaan program-program kegiatan yang sepenuhnya mampu memberikan manfaat dalam rangka mendukung




Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2025 untuk kesejahteraan masyarakat Kapuas Hulu yang adil dan merata.

Putussibau, Oktober 2025

Pj Sekretaris Daerah  
Kabupaten Kapuas Hulu,



  
Agustinus Stormandi



## LAMPIRAN

### LAMPIRAN 1 Daftar Dokumen SAKIP Sekretariat Daerah

No	Nama Dokumen	LINK					
1	Renstra	<a href="#">Penetapan</a>	<a href="#">Ranhir 25-29</a>	<a href="#">Ranwal 2025-29</a>	<a href="#">2021-25</a>		
2	Renja	<a href="#">2028</a>	<a href="#">2027</a>	<a href="#">2026</a>	<a href="#">2025</a>	<a href="#">2024</a>	<a href="#">2023</a>
3	Perjanjian Kinerja	<a href="#">2023</a>	<a href="#">2024</a>	<a href="#">2025</a>	<a href="#">Perubahan 2025</a>		
4	Pohon Kinerja	<a href="#">2021-25</a>	<a href="#">2025-29</a>				
5	Cascading Kinerja	<a href="#">2021-25 Revisi</a>	<a href="#">2021-25 Revisi II</a>	<a href="#">2025-29</a>			
6	Crosscutting	<a href="#">2021-25</a>	<a href="#">2021-25 Revisi</a>	<a href="#">2025-29</a>			
7	Rencana Aksi	<a href="#">2024</a>	<a href="#">2025</a>				
8	RKA	<a href="#">2023</a>	<a href="#">2024</a>	<a href="#">2025</a>			
9	DPA	<a href="#">2023</a>	<a href="#">2024</a>	<a href="#">2025</a>			
10	DPPA Pergeseran/ Penyempurnaan	<a href="#">2024</a>	<a href="#">2025 (1)</a>	<a href="#">2025 (2)</a>			
11	DPPA	<a href="#">2023</a>	<a href="#">2024</a>	<a href="#">2025</a>			
12	IKU	<a href="#">2022</a>	<a href="#">2023</a>	<a href="#">2024</a>	<a href="#">2025</a>		
13	IKI	<a href="#">2023</a>	<a href="#">2025</a>				
14	SKP						
15	SOP Renja	<a href="#">Link</a>					
16	SOP Pengumpulan & Pengukuran Data Kinerja	<a href="#">Link</a>					
17	SOP Evaluasi Kinerja	<a href="#">Link</a>					
18	Pengukuran Kinerja	<a href="#">Tr 1 2024</a>	<a href="#">Tr 2 2024</a>	<a href="#">Tr 3 2024</a>	<a href="#">Tr 4 2024</a>	<a href="#">Tr 1 2025</a>	<a href="#">Tr 2 2025</a>
19	Evaluasi Kinerja/ Monev	<a href="#">Tr 1 2024</a>	<a href="#">Tr 2 2024</a>	<a href="#">Tr 3 2024</a>	<a href="#">Tr 4 2024</a>	<a href="#">2025</a>	
20	Laporan Kinerja/ LKjIP	<a href="#">2021</a>	<a href="#">2022</a>	<a href="#">2023</a>	<a href="#">2024</a>		
21	LHE AKIP	<a href="#">2021</a>	<a href="#">2022</a>	<a href="#">2023</a>	<a href="#">2024</a>		
22	TL LHE	<a href="#">2022</a>	<a href="#">2023</a>	<a href="#">2024</a>			
23	Refocusing	<a href="#">2024</a>	<a href="#">Pergeseran 2 2025</a>	DPPA 2025			
24	SK Tim Renstra	<a href="#">2025-29</a>					
25	SK Tim SAKIP	<a href="#">2024</a>	<a href="#">2025</a>				
26	Laporan Keuangan	<a href="#">2024</a>					
27	Laporan Hasil Evaluasi Renstra	<a href="#">2021-25</a>	<a href="#">2025-29</a>				
28	Penilaian Mandiri	<a href="#">2026</a>	<a href="#">2025</a>	<a href="#">2024</a>			

Sumber: <https://bit.ly/Daftar-Pustaka-Perencanaan-Setda-KabKH>